

**ANALISIS RASIO KEUANGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(APBD)**

**( Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta )  
Tahun 2005-2007**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh:**

**VALENTINA YESI LUSIANA**

**052114148**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS SANATA DHARMA**

**YOGYAKARTA**

**2009**

**ANALISIS RASIO KEUANGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(APBD)**

**( Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta )  
Tahun 2005-2007**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh:**

**VALENTINA YESI LUSIANA**

**052114148**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2009**

SKRIPSI

**ANALISIS RASIO KEUANGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
(APBD)**

(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta)  
Tahun 2005-2007

Oleh:  
VALENTINA YESI LUSIANA  
052114148



Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Firma', written in a cursive style.

( Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si. QIA )

Tanggal : 28 Juli 2009

**SKRIPSI**  
**ANALISIS RASIO KEUANGAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**(APBD)**

( Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta )  
Tahun 2005-2007

Dipersiapkan dan ditulis oleh:  
**VALENTINA YESI LUSIANA**  
052114148

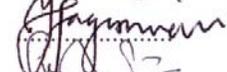
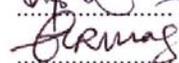
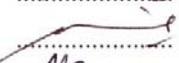
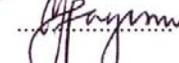
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 22 Agustus 2009  
dan dinyatakan memenuhi syarat

**Susunan Dewan Penguji**

**Nama Lengkap**

Ketua : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt  
Sekertaris : Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA  
Anggota : Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA  
Anggota : Josephine Wuri, S.E., M.Si  
Anggota : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt

**Tanda Tangan**

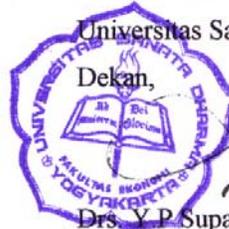
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Yogyakarta, 31 Agustus 2009

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma

Dekan,



  
Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Itulah firman iman, yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.*

*(Roma 10:8-10)*

*Skripsi ini aku persembahkan untuk:*

*Tuhan Yesus Kristus Yang Maha Murah*

*Orang tuaku tersayang*

*Kakak-kakakku*

*Teman-temanmu semua*

*Keluarga besar Universitas Sanata Dharma*

## **LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN**

### **PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Valentina Yesi Lusiana

Nomor Mahasiswa : 052114148

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: ANALISIS RASIO KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2007) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hal untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 23 Agustus 2009

Yang menyatakan



**VALENTINA YESI LUSIANA**



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI-PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

---

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **ANALISIS RASIO KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2007)** dan dimajukan untuk diuji pada tanggal: 22 Agustus 2009 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagian tulisan sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 23 Agustus 2009

Yang Membuat Pernyataan

(Valentina Yesi Lusiana)

## ABSTRAK

### ANALISIS RASIO KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta)  
Tahun 2005-2007

VALENTINA YESI LUSIANA  
052114148  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
2009

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui perkembangan keuangan Kota Yogyakarta ditinjau dari rasio kemandirian selama tahun 2005-2007. (2) mengetahui perkembangan keuangan Kota Yogyakarta ditinjau dari rasio efektivitas dan efisiensi selama tahun 2005-2007. (3) mengetahui perkembangan keuangan Kota Yogyakarta ditinjau dari rasio pertumbuhan selama tahun 2005-2007. (4) mengetahui perkembangan keuangan Kota Yogyakarta ditinjau dari *Debt Service Coverage Ratio* selama tahun 2005-2007.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan. Analisa data kuantitatif digunakan untuk menghitung besarnya rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio pertumbuhan, serta *Debt Service Coverage Ratio*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Rasio kemandirian Kota Yogyakarta yang diukur melalui PAD, hanya mencapai rata-rata sebesar 17,37% untuk setiap tahun dan mengalami penurunan tiap tahun sebesar 1,5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian Kota Yogyakarta masih jauh dari yang diharapkan. (2) Rasio efektivitas pemungutan PAD Kota Yogyakarta mencapai rata-rata sebesar 105,51% dengan peningkatan sebesar 1,89% tiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemungutan PAD sudah efektif. Sedangkan rasio efisiensi pemungutan PAD mencapai rata-rata sebesar 1,57% tiap tahun. Penurunan rasio efisiensi sebesar 0,08% menunjukkan bahwa pemungutan PAD semakin efisien tiap tahunnya. (3) Rasio pertumbuhan APBD pada tahun 2005 sampai dengan 2007 cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada komponen total pendapatan mengalami penurunan sebesar 13,82% dan komponen belanja tidak tersangka yang mengalami penurunan sebesar 501,8%. (4) *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah dilihat dari kemampuan keuangannya layak untuk melakukan pinjaman. Yaitu pada tahun 2005 sebesar 23,69, tahun 2006 sebesar 145,27, dan tahun 2007 sebesar 22,83.

## **ABSTRACT**

# **FINANCIAL RATIO ANALYSIS OF THE REGIONAL EXPENDITURE AND INCOME BUDGET**

**A Case Study at The Municipality Government of Yogyakarta**

**VALENTINA YESI LUSIANA  
052114148  
Sanata Dharma University  
Yogyakarta  
2009**

This research was aimed: (1) to know the financial development of municipality of government Yogyakarta as seen from its autonomy ratio for the years of 2005-2007. (2) to know the financial development of municipality government of Yogyakarta from its effectiveness and efficiency ratio for the years of 2005-2007. (3) to know the financial development of Yogyakarta Regency from its growth ratio for the years of 2005-2007. (4) to know the financial development of municipality Yogyakarta as seen from its Debt Service Coverage Ratio for the years of 2005-2007.

The research was a case study at the municipality of Government Yogyakarta. This research was aimed: (1) to know the financial development of municipality of government Yogyakarta as seen from its autonomy ratio for the years of 2005-2007. (2) to know the financial development of municipality government of Yogyakarta from its effectiveness and efficiency ratio for the years of 2005-2007. (3) to know the financial development of Yogyakarta Regency from its growth ratio for the years of 2005-2007. (4) to know the financial development of municipality Yogyakarta as seen from its Debt Service Coverage Ratio for the years of 2005-2007.

The data collection techniques used in this research were documentation, interview, and literature research. The quantitative data analysis was used to appraise the autonomy ratio, the effectiveness and efficiency ratios, growth ratio and Debt Service Coverage Ratio.

The result of this research pointed that: (1) the average of autonomy ratio of Yogyakarta Regency shown by the regional original income for each year was only 17,37% with 1,5% annual decreasing. It means that the local autonomy of Yogyakarta municipality was still far from expectation. (2) The regional original income collection effectiveness ratio of Yogyakarta municipality for each year was 105,51% in average

with 1,89% annual increasing, which means that the regional original income (RRI) collection of Yogyakarta municipality was already effective. Meanwhile, the regional original income (RRI) collection efficiency ratio of Yogyakarta municipality of each year was 1,57% in average. The decreasing of regional original income collection efficiency was 0,08% every year, which means that the regional original income (RRI) collection was getting more efficient. (3) the growth ratio of expenditure and income budget for the years of 2005-2007 tended to increase except for the income total that was still decreasing up to 13,82% and unexpected expenditure that was still decreasing up to 501,8%. (4) the Debt Service Coverage Ratio of for the years of 2005-2007 showed that the local government as seen from the financial was feasible to make loan, those were 23,69 for 2005, 145,27 for 2006 and 22,83 for 2007.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari pihak lain, skripsi ini tidak dapat terselesaikan, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

1. **Drs. Y.P. Supardiyono, M.Si, Akt., QIA** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. **Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si, Akt., QIA** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. **Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian dan kesabaran membantu penulis dengan memberikan masukan, saran, nasehat, dan semangat selama proses penulisan skripsi.
4. **Segenap dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta** yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah di Universitas Sanata Dharma dan karyawan-karyawan yang telah banyak membantu.

5. **Dra. Indah Setiowati.** Selaku Kepala Sub bagian Umum Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
6. **Sony Haksono, S.E., M.Si.** selaku Kepala Sub Bidang Anggaran Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
7. **Sulistyawati, S.E., M.Si.** selaku Kepala Seksi Bidang Pelaporan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
8. **Sri Sulawesti Kombar Latri, B.SC.** selaku Kepala Seksi BAPPEDA Kota Yogyakarta.
9. **Eko Suryanto, BA.** Selaku Staf Bidang Pelaporan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.
10. **Mamiku dan Papiku** yang penuh cinta dan perhatian telah mendidik dan membesarkan aku, terima kasih yang tak terhingga atas segala doa, pengorbanan dan kasih sayang yang selalu diberikan untuk aku.
11. **Kakak-kakakku: Mas Fendi, Mba Wid, Mba Hetti** yang selalu memberikan doa, perhatian, kasih sayang dan pengorbanannya untukku.
12. **Wella my little sister,** terima kasih atas perhatian, doa, dan kesabarannya mendengarkan cerita-ceritaku.
13. **Matthew....my boy friend,** terima kasih atas doa, semangat, perhatian, dan cinta yang selalu diberikan kepadaku.
14. **Mira, Asty, Tini....my lovely friends,** terima kasih atas doa, bantuan, dorongan, dan perhatian yang selalu diberikan.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran yang dapat membantu sehingga skripsi dapat menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 23 Juli 2009



Penulis

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
D. Tujuan Penelitian .....	3
E. Manfaat Penelitian.....	3
F. Sistematika Penulisan .....	4
BAB II. LANDASAN TEORI.....	7
A. Kinerja.....	7
B. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	9
C. <i>Good Governance</i> .....	20
D. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	23

E. Karakteristik APBD.....	24
F. Fungsi APBD.....	26
G. Analisis Rasio Keuangan pada APBD.....	27
H. Review Penelitian Sebelumnya.....	37
BAB III. METODE PENELITIAN .....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	38
C. Subyek dan Obyek Penelitian .....	38
D. Data yang Dicari/Dibutuhkan .....	39
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Teknik Analisis Data .....	40
BAB IV. GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.....	46
A. Sejarah Kota Yogyakarta .....	46
B. Keadaan Geografis .....	50
C. Penduduk dan Tenaga Kerja .....	54
D. Pemerintahan.....	55
E. Sosial .....	56
F. Pertanian .....	58
G. Industri .....	61
H. Perekonomian.....	63
I. Perhubungan .....	65
BAB V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	68

A. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau	
dari Rasio kemandirian .....	68
1. Menghitung Rasio Kemandirian .....	68
2. Perkembangan Rasio Kemandirian Kota Yogyakarta .....	72
B. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau	
dari Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi .....	75
1. Menghitung Rasio Efektivitas PAD.....	75
2. Perkembangan Rasio Efektivitas PAD Kota Yogyakarta .....	77
3. Menghitung Rasio Efisiensi PAD.....	80
4. Perkembangan Rasio Efisiensi PAD Kota Yogyakarta .....	81
C. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Rasio	
Pertumbuhan .....	84
D. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari DSCR .....	87
BAB VI. PENUTUP .....	93
A. Kesimpulan .....	93
B. Keterbatasan Penelitian .....	93
C. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA .....	96
LAMPIRAN.....	98

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah .....	33
Tabel 2.2 Pertumbuhan Pendapatan daerah.....	35
Tabel 5.1 Perkembangan Realisasi PAD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2007 .....	68
Tabel 5.2 Perkembangan Realisasi Total Pendapatan Kota Yogyakarta Tahun 2005-2007.....	69
Tabel 5.3 Rasio Kemandirian Kota Yogyakarta Tahun 2005-2007 .....	69
Tabel 5.4 Tabel Trend Rasio Kemandirian Kota Yogyakarta Tahun 2005-2007....	72
Tabel 5.5 Perkembangan Target PAD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2007 .....	75
Tabel 5.6 Rasio Efektivitas Kota Yogyakarta Tahun 2005-2007 .....	76
Tabel 5.7 Tabel Trend Rasio Efektivitas Pemungutan PAD Kota Yogyakarta.....	78
Tabel 5.8 Rasio Efisiensi Kota Yogyakarta Tahun 2005-2007 .....	80
Tabel 5.9 Tabel Trend Rasio Efisiensi Kota Yogyakarta Tahun 2005-2007.....	81
Tabel 5.10 Rasio Pertumbuhan Kota Yogyakarta Tahun 2005-2007 .....	84

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Grafik 5.1 Trend Rasio Kemandirian.....	74
Grafik 5.2 Trend Rasio Efektivitas .....	79
Grafik 5.3 Trend Rasio Efisiensi .....	83

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda negara Indonesia memberikan jalan bagi munculnya reformasi total diseluruh kehidupan bangsa Indonesia. Salah satu unsur reformasi total itu adalah tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota (Mardiasmo, 2002: 3). Akibat dari reformasi tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang – Undang tentang sistem pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Undang – Undang itu adalah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dengan kedua Undang – Undang ini diharapkan membawa dampak yang baik bagi Negara Indonesia, khususnya dalam hal tata pemerintahan dan tata keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang kemudian membawa bangsa Indonesia menuju kearah yang lebih baik yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Perubahan sistem politik, sosial dan kemasyarakatan serta ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi, telah menyebabkan tuntutan yang beragam tentang pengelolaan pemerintah yang baik (*good government governance*). Kebijakan *good government governance* merupakan tuntutan yang harus

dipenuhi oleh sektor publik, yang disadari hal itu tidak mudah untuk dilaksanakan karena memerlukan media dan proses untuk mewujudkannya. Tuntutan transparansi publik, kinerja yang baik dan akuntabilitas begitu sering ditunjukkan kepada para manajer pemerintahan di daerah. Seiring dengan itu PP 105 tahun 2000 mensyaratkan pula pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan (Neraca Daerah, Laporan arus Kas, dan Laporan Realisasi Anggaran). Salah satu alat yang dipergunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data keuangan adalah rasio, karena dapat menunjukkan hubungan antara data-data keuangan yang akan memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap prestasi dan kondisi keuangan. Mengingat pentingnya menganalisis laporan keuangan dalam suatu pemerintahan, yang bertujuan untuk penyusunan rencana yang lebih baik, penentuan kebijakan yang lebih tepat, serta untuk mengetahui tingkat kinerja, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis rasio keuangan APBD.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perkembangan keuangan Kota Yogyakarta selama Tahun 2005-2007 ditinjau dari rasio kemandiriannya?
2. Bagaimana perkembangan keuangan Kota Yogyakarta selama Tahun 2005-2007 ditinjau dari rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD?

3. Bagaimana perkembangan keuangan Kota Yogyakarta selama Tahun 2005-2007 ditinjau dari rasio Pertumbuhan?
4. Bagaimana perkembangan keuangan Kota Yogyakarta selama Tahun 2005-2007 ditinjau dari *Debt Service Coverage Ratio*?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perkembangan keuangan daerah Kota Yogyakarta ditinjau dari rasio kemandirian Tahun 2005-2007.
2. Untuk mengetahui perkembangan keuangan daerah Kota Yogyakarta ditinjau dari rasio efektivitas dan efisiensi Tahun 2005-2007.
3. Untuk mengetahui perkembangan keuangan daerah Kota Yogyakarta ditinjau dari rasio pertumbuhan Tahun 2005-2007.
4. Untuk mengetahui perkembangan keuangan daerah Kota Yogyakarta ditinjau dari *Debt Service Coverage Ratio* Tahun 2005-2007.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan keuangan daerah dalam APBD, yang terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli daerah.

## 2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan, wawasan, dan pengetahuan baik untuk mahasiswa Universitas Sanata Dharma maupun pihak lain yang berkepentingan ingin memperdalam pengetahuan tentang keuangan daerah.

## 3. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk memperdalam dan menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama di bangku kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **Bab I           Pendahuluan**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah yang dibatasi pada analisis kinerja berdasarkan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio pertumbuhan, dan *Debt Service Coverage Ratio* dari tahun 2005-2007. Bab ini juga menguraikan tujuan penelitian, manfaat penelitian baik bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, bagi Universitas Sanata Dharma maupun bagi penulis, serta diuraikan pula sistematika penulisan.

**Bab II Landasan Teori**

Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian kinerja, kerangka kinerja, laporan keuangan pemerintah daerah, *Good Governance*, pengertian APBD, karakteristik APBD, Fungsi APBD, analisis rasio keuangan pada APBD, dan review penelitian sebelumnya.

**Bab III Metode Penelitian**

Dalam bab ini akan dipaparkan jenis penelitian yang dilakukan, tempat dan waktu penelitian, subyek penelitian, obyek penelitian, data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data. Untuk melakukan analisa data, dihitung besarnya rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, dan *Debt Service Coverage Ratio* dan perkembangan masing-masing rasio. Untuk mengetahui besarnya rasio pertumbuhan, dilakukan perhitungan pertumbuhan dari masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran.

**Bab IV Gambaran Umum Pemerintah Kota Yogyakarta**

Dalam gambaran umum Pemerintah Kota Yogyakarta akan diuraikan mengenai sejarah berdirinya, keadaan geografis, keadaan penduduk, agama, sosial, pemerintahan, pertanian, industri, perekomian, dan perhubungan

**Bab V Analisis Dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan diuraikan analisis dan pembahasan perkembangan keuangan daerah Pemerintah Kota Yogyakarta ditinjau dari rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio pertumbuhan, dan *Debt Service Coverage Ratio*.

**Bab VI Penutup**

Dengan melihat hasil penelitian, pada bab ini diuraikan kesimpulan yang dapat ditarik, keterbatasan-keterbatasan penelitian, serta beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah Kota Yogyakarta.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kinerja**

##### **1. Pengertian Kinerja**

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan rencana strategik suatu organisasi (IAI-Kompartemen Akuntan Sektor Publik-Bidang Akuntabilitas Sektor Publik, 2002 : 4). Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi dan misi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif suatu kebijakan operasional yang diambil. Kinerja dapat diartikan sebagai prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam suatu periode tertentu. Kinerja menunjukkan tingkat efisiensi dan efektivitas serta inovasi dalam pencapaian tujuan oleh pihak manajemen dan divisi-divisi yang ada di dalam organisasi (IAI-Kompartemen Akuntan Sektor Publik-Bidang Akuntabilitas Sektor Publik, 2002 : 9).

Evaluasi kinerja mengandung pengertian bahwa pihak yang berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan kebijakan harus melaporkan penerapan tolak ukur pengukuran kinerja

pelaksanaannya melalui analisis kegiatan unit instansi pemerintah yang membandingkan antara realisasi dan rencana (IAI-Kompartemen Akuntan Sektor Publik-Bidang Akuntabilitas Sektor Publik, 2002 : 1).

## 2. Kerangka kerja

Ketika individu atau organisasi menerima wewenang dan/ atau delegasi tanggung jawab, mereka harus memberikan rencana, melaksanakan rencana, mengukur dan melaporkan hasil yang relatif nyata terhadap rencana. Penerimaan laporan ini akan menghasilkan umpan balik rencana baru yang telah dikembangkan dan siklus baru. Siklus ini memberikan dasar kerangka kerja untuk *akuntabilitas*. *Contoh dari siklus ini adalah kerangka kerja yang disajikan dalam dokumen Auditor General of Alberta's document, Government Accountability (1997)*. Lima langkah dalam kerangka kerja:

### 1) Menyusun tujuan terukur dan tanggung jawabnya.

Mengikuti rencana strategik kemudian mengembangkan sasaran, ukuran-ukuran dan ekspektasinya. Identifikasi peran dan tanggung jawab dalam hubungan pencapaian ekspektasi tersebut.

### 2) Rencana apa yang diperlukan untuk melaksanakan pencapaian tujuan.

Identifikasi tindakan apa yang diperlukan untuk dilaksanakan oleh seseorang, pada waktu apa/ kapan dan berapa biayanya. Identifikasi sumber daya yang penting yang diperlukan untuk

mencapai tujuan. Identifikasi konsekuensi-konsekuensi yang timbul dan yang mungkin akan timbul.

3) Melaksanakan pekerjaan dan memonitor perkembangannya.

Melaksanakan kerja dan mengukur perkembangannya, mengumpulkan dan menganalisis data kinerja.

4) Laporan Hasil

Menyiapkan secara lengkap, dapat dipahami, dan laporan yang nyata pada hasil kinerja, serta mendistribusikan pada pihak yang berkepentingan tepat waktu.

5) Evaluasi hasil dan mengusahakan umpan balik.

Evaluasi hasil untuk menunjukkan apakah tindakan koreksi diperlukan untuk meningkatkan kinerja, atau untuk menunjukkan penghargaan yang harus diberikan bagi kinerja yang efisien dan efektif.

## **B. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

### **1. Undang-Undang Nomer 32 dan 33 Tahun 2004**

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud bersumber dari:

### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang Nomer 33 Tahun 2004, sumber-sumber PAD terdiri dari:

#### 1) Pajak Daerah

Pajak daerah atau pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

#### 2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi terdiri dari:

a) **Retribusi Jasa Umum**

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b) **Retribusi jasa usaha**

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.

c) **Retribusi perizinan tertentu.**

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3) **Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan**

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

a) **Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/**

**BUMD**

- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari:

- a) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah

#### **b. Dana Perimbangan**

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan itu sendiri terdiri atas:

- 1) Dana bagi hasil yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana

bagi hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana yang dimaksud terdiri atas: pajak bumi dan bangunan. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan pajak penghasilan, dan dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana yang dimaksud berasal dari: kehutanan; pertambangan umum; perikanan; pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

- 2) Dana alokasi umum yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Dana Alokasi khusus yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

**c. Lain-lain Pendapatan.**

Lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat.

Menurut peraturan menteri dalam negeri tentang alokasi biaya pemungutan pajak daerah yaitu: Biaya Pemungutan Pajak Daerah yang dialokasikan merupakan bagian dari biaya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Penerangan Jalan. Biaya Pemungutan

Pajak daerah diberikan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dalam bentuk lumpsum yang sudah dipertanggung jawabkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan disetor ke rekening khusus Tim Pembina Pusat. Biaya Pemungutan Pajak Daerah disebut Dana penunjang Pembinaan. Dan Penunjang Pembinaan tersebut digunakan untuk Pembinaan Umum dan Pembinaan teknis.

Dan pembiayaan sebagaimana yang dimaksud bersumber dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah
- c. Dana Cadangan Daerah, dan
- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bentuk laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta risiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh

dan digunakan telah dilaksanakan sesuai prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Elemen-elemen yang terdapat dalam laporan realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan yaitu semua penerimaan kas umum Negara/ kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar lagi oleh pemerintah. Sedangkan pendapatan yaitu hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Belanja yaitu semua pengeluaran kas umum Negara/ daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan belanja yaitu kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan.
- d. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari

pinjaman dan hasil divestasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

## **2. Neraca**

Neraca merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menunjukkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah pada tanggal tertentu. Elemen-elemen yang terdapat di dalam neraca:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dari mana manfaat ekonomi/ sosial di masa depan yang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset nonlancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan terjadinya pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban dikelompokkan dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diselesaikan setelah dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.
- c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

### **3. Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Elemen-elemen yang terdapat di dalam laporan arus kas terdiri dari:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas masuk ke bendahara umum Negara/ daerah
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas keluar dari bendahara umum Negara/ daerah.

#### **4. Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Hal-hal yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/ Perda APBD, serta kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d. Informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan

- e. Informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- f. Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam laporan keuangan.

Komponen pada struktur anggaran (Mardiasmo, 2002 : 11-12) :

a. Belanja Rutin

Belanja rutin adalah pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah yang ditujukan untuk membiayai kegiatan sehari-harinya. Selama ini satu-satunya ukuran kinerja yang dijadikan sebagai penilaian kinerja adalah jumlah maksimal yang dapat dibelanjakan untuk setiap pos pengeluaran rutin dan hal tersebut merupakan tingkat penyerapan anggaran maksimal yang diharapkan dapat dicapai.

Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja yang baik jika pemerintah daerah maupun dinas mampu menggunakan secara keseluruhan item anggaran rutin (*line item*) sesuai dengan proporsi anggaran yang telah disahkan atau dengan kata lain memiliki tingkat penyerapan anggaran yang maksimal. Evaluasi atas pelaksanaan yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja dan penyusunan anggaran tahun berikutnya didasarkan pada selisih atau varian dari anggaran dan realisasi sesungguhnya.

b. Belanja Pembangunan

Belanja pembangunannya adalah pengeluaran pemerintah daerah yang bersifat investasi dan ditujukan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah sebagai salah satu pelaku pembangunan. Ukuran kinerja yang digunakan adalah jumlah dana pada setiap pos pengeluaran pembangunan yang tertera dalam anggaran daerah sebagai jumlah maksimal yang dapat dibelanjakan untuk setiap pos pengeluaran pembangunan. Jika terjadi pengeluaran rutin pemerintah daerah yang cenderung menghabiskan dana, maka pada pengeluaran pembangunan hal yang sama juga terjadi. Selain itu, evaluasi jenis belanja ini adalah apakah sudah sesuai dengan logika penyusunan dan standar atau kriteria pencapaiannya.

### **C. *Good Governance***

*Good governance* merupakan paradigma yang dikembangkan oleh *World bank*, *United nation Development programme* (UNDP) dan *Asia development Bank* (ADB) yang menegaskan pentingnya kesejajaran dan keharmonisan hubungan antara tiga elemen kunci Negara: pemerintah (*government*), pasar (*business*), dan masyarakat (*civil society*). Sebab hanya dengan demikian terwujudlah Negara yang bersih dan responsif (*clean and responsive state*), berkembangnya masyarakat madani (*vibrant civil society*) dan kehidupan bisnis yang bertanggung jawab (*good corporate governance*) bukan sekedar impian lagi. Untuk itu aspek utama yang perlu diperhatikan adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada berbagai aktivitas, baik ekonomi, sosial, dan politik (Budisantoso, 200: susilo, 2001).

## 1. Pengertian *Governance*

Menurut Mardiasmo pengertian *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. (Mardiasmo, 2002:17).

*World Bank* memberi definisi sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Sementara itu *United National Development Programme* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all level* “. Dalam hal ini *World Bank* menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan Negara.

Jika mengacu pada program *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

## 2. Karakteristik *Good Governance* menurut UNDP

UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

- a) *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b) *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c) *Transparance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi.
- d) *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
- e) *Consensus orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- f) *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g) *Efficiency dan effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
- h) *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i) *Strategic vision*. Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

### **3. Reformasi Manajemen Keuangan Daerah**

Penerapan prinsip *good governance* menurut adanya reformasi manajemen keuangan pemerintah. Reformasi tersebut diperlukan untuk dapat menghasilkan suatu manajemen keuangan pemerintah yang transparan, akuntabel, yang mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan supremasi hukum di bidang keuangan Negara dan meningkatkan kinerja pemerintah.

Reformasi manajemen keuangan perlu dilakukan secara menyeluruh sejak dari proses perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, sistem informasi dan audit. Hal ini sangat penting untuk dipahami bersama karena reformasi yang terpenggal-penggal hanya akan menghasilkan output yang tidak optimal, jika tidak ingin dikatakan gagal.

#### **D. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

APBD merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan instruksi menteri dalam negeri serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi APBD mudah dilakukan. Pada sisi lain APBD dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja (Halim, 2004: 234).

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Mardiasmo (2002: 9) dalam bukunya Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah adalah rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun).

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Mamesah (1995: 20) adalah:

Rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud

Definisi tersebut mengandung unsur sebagai berikut (Mamesah, 1995: 20-21):

- 1) Rencana operasional daerah, yang menggambarkan adanya aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dimana aktivitas tersebut telah diuraikan secara rinci.
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang ada merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- 3) Dituangkan dalam bentuk angka, jenis kegiatan dan jenis proyek.
- 4) Untuk keperluan satu tahun anggaran.

#### **E. Karakteristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Karakteristik APBD (Halim, 2004: 16-17) di era pra reformasi antara lain:

- a) APBD disusun oleh DPRD bersama-sama Kepala Daerah (pasal 30 UU No.5/1975).
- b) Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan anggaran adalah pendekatan *line item* atau pendekatan tradisional. Dalam pendekatan ini anggaran disusun

berdasarkan jenis penerimaan dan jenis pengeluaran. Oleh karena itu, setiap baris dalam APBD menunjukkan tiap jenis penerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran pendekatan ini bertujuan untuk melakukan pengendalian atas pengeluaran. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling tradisional (tertua) diantara berbagai pendekatan penyusunan anggaran.

- c) Siklus APBD terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, penyusunan dan perhitungan APBD. Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban APBD. Pertanggungjawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk Pemerintah Daerah Tingkat I dan Kepada Gubernur untuk Pemerintah Daerah Tingkat II. Oleh karena itu, pertanggungjawaban bersifat vertikal.
- d) Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan dan tahap penyusunan dan penetapan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan/ audit bersifat keuangan. Hal ini tampak pada pengawasan pendapatan daerah dan pengawasan pengeluaran daerah.
- e) Pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan tiga unsur utama, yaitu unsur ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, unsur kehematan dan efisiensi, dan unsur hasil program (untuk proyek-proyek daerah).
- f) Sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan *stelsel cameral* (tata buku anggaran). Menurut *stelsel* (sistem pembukuan) ini, penyusunan anggaran dan

pembukuan saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dasar pemilihan stelsel adalah tujuan pembukuan.

Di era (pasca) reformasi, bentuk APBD mengalami perubahan cukup mendasar. Bentuk APBD yang baru didasarkan pada Keputusan menteri Dalam Negeri Nomer 29 tahun 2002.

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan makin informatif. Untuk itu, dalam bentuk yang baru, APBD terdiri atas tiga bagian, yaitu Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori baru yang belum ada pada APBD di era pra reformasi. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD makin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah.

#### **F. Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)**

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Anggaran digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2002: 9). Adapun fungsi APBD (Mamesah, 1995: 18) adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan pada rakyat daerah yang bersangkutan.
- b. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggungjawab
- c. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah umumnya dan kepada daerah khususnya, karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijakan pemerintah daerah.
- d. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna.
- e. Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah di dalam batas-batas tertentu.

#### **G. Analisis Rasio Keuangan Pada APBD**

Analisis keuangan usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabil, analisa terhadap rasio keuangan perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2004: 283).

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan pada APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2004: 282). Rasio keuangan merupakan alat yang dinyatakan dalam artian relatif maupun absolut

untuk menjelaskan hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka yang lainnya dari suatu laporan keuangan (Syafaruddin, 1989: 95). Penganalisa dapat mempelajari komposisi perubahan dan menentukan apakah ada peningkatan atau penurunan dalam kondisi dan prestasi keuangan selama waktu yang dianalisis. Rasio keuangan juga dapat dihitung untuk proyeksi atau proforma laporan dan membandingkan antara rasio sekarang dengan rasio yang lalu (Agus, 1994: 102).

Analisa rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah yang lain yang terdekat maupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Beberapa rasio keuangan yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain (Halim, 2004: 284-291):

#### 1. Kemandirian

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal

dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah, akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Ada empat macam pola hubungan yang memperkenalkan “Hubungan Situasional” yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomer 33 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah antara lain (Halim, 2004: 188-189):

- a. Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. (Daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b. Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mapan, melaksanakan otonomi.
- c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
- d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat, sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0% - < 25%	Instruktif
Rendah	25% - < 50%	Konsultatif
Sedang	50% - < 75%	Parisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

## 2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dengan *output*. Pengertian efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli daerah}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil daerah}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1(satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang semakin baik, rasio efektivitas tersebut perlu diperbandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah.

Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Pengertian efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}}$$

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar dari pada realisasi pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}$$

Keterangan:

- 1) *Input* adalah sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas.

- 2) *Output* adalah hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan.
- 3) *Outcome* adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. *Outcome* lebih sulit ditetapkan dan diukur dibandingkan dengan penetapan dan pengukuran *input* maupun *output*.

### 3. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*Growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Adapun rumus yang digunakan adalah:

$$r = \frac{pt - po}{po}$$

Misal, Data:

Tabel 2.2  
Pertumbuhan Pendapatan Daerah

URAIAN	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2006 (pt)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2005 (po)	PERTUMBUHAN	
			RUPIAH	%
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>27.726.880.565</b>	<b>21.882.645.750</b>	<b>5.844.234.815</b>	<b>26,70</b>
Pendapatan pajak daerah	5.690.472.910	4.125.175.450	1.565.297.460	37,94
Pendapatan retribusi daerah	17.400.335.200	13.778.620.700	3.621.714.500	26,28
Pendapatan Bagian Laba perusahaan daerah	210.290.000	188.325.600	21.964.400	11,66
Lain-lain PAD yang sah	4.425.782.455	3.790.524.000	635.258.455	16,76
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>332.185.488.695</b>	<b>315.843.179.745</b>	<b>16.342.308.950</b>	<b>5,17</b>
Transfer pemerintah Pusat-dana Perimbangan	<b>317.179.966.175</b>	<b>302.083.588.895</b>	15.096.377.280	4,99
Dana bagi hasil Pajak	11.895.785.850	10.901.560.420	994.225.430	9,12
Dana bagi hasil SDA	8.759.180.325	7.391.528.475	1.367.651.850	18,50
Dana Alokasi umum	286.025.000.000	273.790.500.000	12.234.500.000	4,46
Dana Alokasi Khusus	10.500.000.000	10.000.000.000	500.000.000	5,00
Transfer Pemerintah Provinsi	<b>15.005.522.520</b>	<b>13.759.590.850</b>	<b>1.245.931.670</b>	<b>9,05</b>
Pendapatan bagi Hasil Pajak	11.525.312.120	10.829.445.000	695.867.120	6,42
Pendapatan bagi Hasil Lainnya	3.480.210.400	2.930.145.850	550.064.550	18,77
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	<b>25.707.490.330</b>	<b>25.067.733.245</b>	<b>639.757.085</b>	<b>2,55</b>
Pendapatan hibah	9.429.320.455	9.185.330.250	243.990.205	2,65
Pendapatan Dana Darurat	8.430.249.650	8.349.720.375	80.529.275	0,96
Pendapatan lainnya	7.847.920.225	7.532.682.620	315.237.605	4,18
<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>385.619.859.590</b>	<b>362.793.558.740</b>	<b>22.826.300.850</b>	<b>6,29</b>

Sumber data: Mahmudi (200: 126)

Keterangan:

Pt = data pada tahun tertentu (tahun 2006)

Po = data pada tahun ke-0 (tahun 2005)

r = pertumbuhan

#### 4. *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

DSCR merupakan rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kembali pinjaman daerah. Rasio ini sangat diperlukan apabila pemerintah daerah berencana untuk mengadakan utang jangka panjang. Berdasarkan rasio ini, pemerintah daerah dinilai layak untuk melakukan pinjaman daerah apabila nilai DSCR-nya minimal sebesar 2,5. Jika nilai DSCR kurang dari 1, maka hal itu mengidentifikasikan terjadinya arus kas negatif, yang berarti pendapatan tidak cukup untuk menutup seluruh beban utang berupa angsuran pokok dan bunga. Rasio DSCR ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DSCR} = \frac{(\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}) - \text{Belanja wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain-lain}}$$

Keterangan:

PAD = Pajak Asli Daerah

DBH = Dana Bagi Hasil

DBHDR = Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

DAU = Dana Alokasi umum

Belanja Wajib = Belanja Pegawai

## H. Review Penelitian Sebelumnya

Widodo (2000) telah melakukan analisa rasio keuangan pada APBD Kabupaten Boyolali yang dimuat dalam buku Bunga rampai Manajemen Keuangan Daerah. Berdasarkan analisa tersebut disimpulkan bahwa kemandirian Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam memenuhi kebutuhan dana untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih relatif rendah dan bahkan cenderung turun yaitu dari 16,65% pada tahun anggaran 1997/1998 menjadi 9,69% pada tahun 2000. Sebagian besar pendapatan Kabupaten Boyolali masih diprioritaskan untuk mencukupi belanja rutin yaitu rata-rata mencapai 80% dari total pendapatan yang diterima.

Penelitian sejenis juga telah dilakukan oleh Muryani (2005) yang melakukan studi kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. Dari penelitiannya tersebut disimpulkan bahwa tingkat kemandirian hanya mencapai rata-rata 10,12% untuk setiap tahun dengan peningkatan sebesar 0,53% tiap tahun. Rasio Efektivitas mencapai rata-rata sebesar 114,85% dengan peningkatan sebesar 5,35% tiap tahun. Dan pada rasio pertumbuhan cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada komponen belanja operasi dan pemeliharaan yang mengalami penurunan sebesar 72,13%.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus, yaitu penelitian terhadap obyek tertentu sehingga kesimpulan yang diambil berdasarkan penelitian terbatas pada obyek yang diteliti.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **a. Tempat penelitian**

Penelitian dilakukan di Pemerintah Kota Yogyakarta

##### **b. Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2009 sampai dengan Juli 2009.

#### **C. Subyek dan Obyek Penelitian**

##### **a. Subyek Penelitian**

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta (BAPPEDA)
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta,
3. BPS Kota Yogyakarta

##### **b. Obyek Penelitian**

1. Data Laporan Realisasi Anggaran tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.

2. Data anggaran pemungutan dan realisasi biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.
3. Data anggaran penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.
4. Data realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.

#### **D. Data yang Dicari/Dibutuhkan**

- a. Gambaran umum Kota Yogyakarta
- b. Laporan Realisasi Anggaran tahun 2005 sampai dengan tahun 2007
- c. Anggaran PAD tahun 2005 sampai dengan tahun 2007
- d. Realisasi PAD tahun 2005 sampai dengan tahun 2007
- e. Anggaran biaya pemungutan PAD tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.
- f. Realisasi Biaya pemungutan PAD tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan baik berupa data primer maupun sekunder, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data tersebut, data gambaran umum Kota Yogyakarta, data APBD, target PAD, realisasi PAD, target

biaya pemungutan PAD, dan realisasi biaya pemungutan PAD di Kota Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian, yakni pejabat yang berwenang. Teknik wawancara ini dilakukan untuk melengkapi data-data yang diperlukan yang tidak dapat ditemukan dalam teknik pengumpulan data secara dokumentasi.

c. Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang mendukung penelitian dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan dari literatur. Data ini dipergunakan untuk mendapatkan analogi yang berguna dalam perumusan teori-teori dan landasan bagi penganalisis data primer.

## **F. Teknik Analisis Data**

Untuk menjawab permasalahan pertama, penulis menggunakan dua langkah yaitu:

1. Menghitung Rasio Kemandirian dengan langkah-langkah:
  - a) Menjumlahkan komponen-komponen realisasi pendapatan asli daerah dari Tahun 2005-2007.
  - b) Menghitung total pendapatan dari tiap-tiap tahun
  - c) Membagi pendapatan asli daerah dengan total pendapatan
  - d) Pembahasan

2. Untuk mengetahui perkembangan rasio kemandirian tersebut digunakan metode kuadrat terkecil (*least square*) dalam menentukan trend. Dengan formula:

$$Y' = a + bX$$

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X}$$

Keterangan:

Y = Variabel rasio kemandirian

Y' = Trend

a = Besarnya Y saat X = 0

b = Besarnya perubahan Y bila X mengalami perubahan 1 satuan

X = Waktu

Dari trend rasio kemandirian dapat diketahui besarnya rata-rata kemandirian dengan melihat besarnya nilai a yang diperoleh. Besarnya presentase perkembangan kemandirian setiap tahun dapat dilihat dari besarnya nilai b. Rasio kemandirian dikatakan berkembang, jika nilai b positif.

Untuk menjawab permasalahan kedua, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menghitung Rasio Efektivitas dengan langkah-langkah:

- a) Menjumlahkan komponen-komponen realisasi pendapatan asli daerah dari tiap-tiap tahun.
- b) Menghitung total pendapatan dari tiap-tiap tahun
- c) Membagi pendapatan asli daerah dengan total pendapatan
- d) Pembahasan

2. Untuk mengetahui perkembangan rasio efektivitas tersebut, digunakan metode kuadrat terkecil (*least square*) dalam menentukan trend. Dengan formula:

$$Y' = a + bX$$

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X}$$

Keterangan:

Y = Variabel rasio efektivitas

Y' = Trend

a = Besarnya Y saat X = 0

b = Besarnya perubahan Y bila X mengalami perubahan 1 satuan

X = Waktu

Dari trend rasio efektivitas pemungutan PAD dapat diketahui besarnya rata-rata efektivitas pemungutan PAD dengan melihat besarnya nilai a yang diperoleh. Besarnya presentase perkembangan efektivitas pemungutan PAD dapat dilihat dari besarnya nilai b. Sehingga efektivitas pemungutan PAD dapat dikatakan berkembang, jika nilai b positif.

3. Menghitung rasio efisiensi dengan langkah-langkah:

- a) Menjumlahkan komponen-komponen biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah dari tiap-tiap tahun
- b) Menjumlahkan komponen-komponen realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dari tiap-tiap tahun
- c) Membagi biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah dengan realisasi penerimaan asli daerah.
- d) Pembahasan

4. Untuk mengetahui perkembangan rasio efisiensi tersebut, digunakan metode kuadrat terkecil (*least square*) dalam menentukan trend. Dengan formula:

$$Y' = a + bX$$

$$a = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X}$$

Keterangan:

$Y$  = Variabel rasio efisiensi

$Y'$  = Trend

$a$  = Besarnya  $Y$  saat  $X = 0$

$b$  = Besarnya perubahan  $Y$  bila  $X$  mengalami perubahan 1 satuan

$X$  = Waktu

Dari trend rasio efisiensi pemungutan PAD dapat diketahui besarnya rata-rata efisiensi pemungutan PAD dengan melihat besarnya nilai  $a$  yang diperoleh. Besarnya presentase perkembangan efisiensi pemungutan PAD dapat dilihat dari besarnya nilai  $b$ . Sehingga efisiensi pemungutan PAD dapat dikatakan berkembang, jika nilai  $b$  positif.

Untuk menjawab permasalahan ketiga, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menghitung pertumbuhan dari masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran, dengan cara hasil yang dicapai pada tahun anggaran tertentu dikurangi dengan hasil yang dicapai pada tahun ke-0 kemudian dibandingkan dengan hasil yang dicapai pada tahun ke-0.

Dalam perhitungan rasio pertumbuhan, dikatakan berkembang jika hasil yang dicapai mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- 2) Pembahasan

Untuk menjawab permasalahan keempat, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menjumlahkan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil setelah dikurangi dengan dana bagi hasil dana reboisasi serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib
2. Menjumlahkan angsuran pokok pinjaman, bunga dan biaya lain-lain.
3. Membandingkan antara penjumlahan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil setelah dikurangi dengan dana bagi hasil dana reboisasi serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib dengan penjumlahan angsuran pokok pinjaman, bunga dan biaya lain-lain. Dengan rumus:

$$DSCR = \frac{(PAD + (DBH - DBHDR) + DAU) - Belanja Wajib}{Angsuran Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya lain-lain}$$

DSCR dikatakan berkembang, jika nilai DSCRnya lebih dari 2,5 dan DSCRnya semakin meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4. Pembahasan

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

#### **A. Sejarah Kota Yogyakarta**

Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti: Negara Mataram dibagi dua: Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah. Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan. Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755.

Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton. Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Menempatnya pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan. Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmian. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian mana terjadi Tanggal 7 Oktober 1756.

Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus

1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede

dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta. Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr.Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955. Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga

Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

## **B. Keadaan Geografis**

### **I. Batas Wilayah**

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta

terletak ditengah-tengah Propinsi DIY. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut

Sebelah utara	: Kabupaten Sleman
Sebelah timur	: Kabupaten Bantul & Sleman
Sebelah selatan	: Kabupaten Bantul
Sebelah barat	: Kabupaten Bantul & Sleman

## **II. Keadaan Alam**

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara  $110^{\circ} 24^I 19^{II}$  sampai  $110^{\circ} 28^I 53^{II}$  Bujur Timur dan  $07^{\circ} 49^I 26^{II}$  sampai  $07^{\circ} 15^I 24^{II}$  Lintang Selatan dengan luas sekitar  $32,5 \text{ Km}^2$  atau 1,02% dari luas wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari utara ke Selatan kurang lebih 7,5 Km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 Km.

Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0 – 2 %) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100 – 199 meter dpa. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol.

Secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan  $\pm 1$  derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu

Sebelah timur adalah Sungai Gajah Wong

Bagian tengah adalah Sungai Code

Sebelah barat adalah Sungai Winongo

### **III. Tipe Tanah**

Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, disebabkan oleh letaknya yang berada didataran lereng gunung Merapi (*fluvia volcanic foot plain*) yang garis besarnya mengandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda. Sejalan dengan perkembangan Perkotaan dan Pemukiman yang pesat, lahan pertanian Kota setiap tahun mengalami penyusutan. Data tahun 1999 menunjukkan penyusutan 7,8% dari luas area Kota Yogyakarta (3.249,75) karena beralih fungsi, (lahan pekarangan)

#### **IV. Iklim**

Secara umum, rata-rata curah hujan tertinggi selama tahun 2007 terjadi pada bulan Desember, yaitu sebanyak 524 mm dan terendah terjadi pada bulan juli (2 mm). Rata-rata hari hujan per bulan adalah 7,67 hari.

Kelembaban udara rata-rata cukup tinggi, tertinggi terjadi pada bulan April sebesar 86 persen dan terendah pada bulan September sebesar 73 persen. Tekanan udara rata-rata 1.010,4 mb dan suhu udara rata-rata 1.010,4 mb dan suhu udara rata-rata 26,6° C.

#### **VI. Demografi**

Pertambahan penduduk Kota dari tahun ke tahun cukup tinggi, pada akhir tahun 1999 jumlah penduduk Kota 490.433 jiwa dan sampai pada akhir Juni 2000 tercatat penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 493.903 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 15.197/km<sup>2</sup>. Angka harapan hidup penduduk Kota Yogyakarta menurut jenis kelamin, laki-laki usia 72,25 tahun dan perempuan usia 76,31 tahun.

### **C. Penduduk dan Tenaga Kerja**

#### **a. Penduduk**

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000, penduduk Kota Yogyakarta berjumlah 397.398 orang yang terdiri dari 194.530 orang (48,95 persen) laki-laki dan 202.868 orang (51,05 persen) perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan hasil Supas tahun 2005 sebanyak 435.236 orang. Dengan demikian rata-rata pertumbuhan penduduk periode tahun 2000-2005 sebesar 1,9 persen.

Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2000 jumlah penduduk tahun 2007 tercatat 451.118 orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 48,86 persen laki-laki dan 51,14 persen perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

#### **b. Tenaga Kerja**

Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 tercatat 9.880 orang. Yang terdiri dari 88,39 persen pegawai pemerintah daerah dan 11,61 persen pegawai pemerintah pusat. Berdasarkan golongan kepangkatan, di kota Yogyakarta terdapat pegawai negeri sipil daerah golongan I 2,77 persen, golongan II 20,09 persen, golongan III 49,21 persen dan sisanya golongan IV 27,93 persen.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi tahun 2007 sebanyak 21,408 orang yang terdiri dari 12.495 laki-laki dan 8.913 perempuan. Sebagian besar dari pencari kerja tersebut berpendidikan sarjana yaitu 60,95 persen, kemudian diikuti yang berpendidikan SMU (27,20 persen), Diploma (,16 persen) dan sisanya berpendidikan S2, SMP, dan SD.

c. Transmigrasi

Jumlah transmigrasi dari Kota Yogyakarta pada tahun 2007 tercatat 50 kepala keluarga yang terdiri dari 172 jiwa. Sebagian besar transmigran tersebut berasal dari Kecamatan Mergangsan dan Tegalrejo, dan daerah penempatan terbanyak adalah Kalimantan Barat.

#### **D. Pemerintahan**

1) Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Walikota sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) adalah Badan Legeslatif daerah. DPRD Kota Yogyakarta masa bhakti 2004-2009 terdiri dari 35 orang anggota berasal dari 5 fraksi.

## 2) Pembagian Wilayah

Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan, 45 keseluruhan, 614 RW dan 2.523 RT dengan luas wilayah 32,5 km<sup>2</sup>. Penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.104, 357 hektar dan bagian terkecil berupa lahan kosong seluas 20,113 hektar.

## E. Sosial

### 1) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu perlu didukung dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga pengajar yang memadai.

Pada tingkat pendidikan pra sekolah dan sekolah menengah sebagian besar diselenggarakan oleh pihak swasta. Sedangkan untuk tingkat pendidikan dasar lebih banyak diselenggarakan oleh Pemerintah.

Pada tahun ajaran 2007/2008 di Kota Yogyakarta terdapat 49 perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi tersebut terdiri dari 6 universitas, 12 institut/sekolah tinggi dan 31 akademi. Jumlah dosen sebanyak 2.261 orang yang terdiri dari 1.982 orang dosen yayasan dan 279 orang dosen DK. Jumlah mahasiswa yang terdaftar sebanyak 42.596 orang.

## 2) Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan dan tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2007 jumlah dokter praktek di Kota Yogyakarta mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 1.830 orang pada tahun 2006 menjadi 1.024 orang pada tahun 2007. Dan jumlah apotek adalah 119.

Untuk menekan pertumbuhan penduduk, pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana (KB). Respon masyarakat terhadap program tersebut cukup positif. Hal ini terlihat pada tingginya jumlah penduduk yang aktif menjadi akseptor. Pada tahun 2007 jumlah akseptor tercatat 33.964 orang atau 70,15 persen dari pasangan usia subur (PUS) yang terdapat di Kota Yogyakarta. Alat kontrasepsi yang banyak digunakan adalah IUD (32,45 persen).

## 3) Agama

Penduduk Kota Yogyakarta mayoritas memeluk agama Islam. Jumlah pemeluk agama Islam pada tahun 2007 sebanyak 406,915 orang atau 77,32 persen dari total penduduk Kota Yogyakarta. Pemeluk agama yang lain adalah 13,06 persen Khatolik, 8,58 Persen Kristen, 0,43 persen Hindu, 0,59 persen Budha dan 0,02 persen lainnya.

#### 4) Peradilan

Tindak kejahatan di Kota Yogyakarta menunjukkan gejala terjadinya peningkatan. Pada tahun 2007 perkara pelanggaran yang masuk ke pengadilan Negeri Yogyakarta sebanyak 17.006 perkara atau naik 4,46 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian pula jumlah perkara di Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengalami penurunan dan sebaliknya penghuni Lembaga pemasyarakatan mengalami kenaikan. Jumlah perkara di Kejaksaan Negeri Yogyakarta turun dari 331 pada tahun 2006 menjadi 255 pada tahun 2007. Penghuni lembaga pemasyarakatan bertambah dari 609 orang menjadi 785 orang.

#### 5) Sosial Lainnya

Jumlah anak yatim piatu yang diasuh dalam panti pada tahun 2007 sebanyak 413 anak yang terdiri dari 201 anak perempuan dan 212 anak laki-laki. Jumlah penderita cacat tercatat 3,334 orang. Pada tahun 2006 yang terlantar berjumlah 651 orang dan pada tahun 2007 menurun menjadi 640 orang.

### **F. Pertanian**

#### 1. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan bukan sawah meliputi lahan untuk bangunan dan sekitarnya seperti tegal/kebun ladang/huma, padang rumput, tambak,

kolam/tebet/empang, lahan yang sementara tidak diusahakan., lahan untuk tanaman kayu-kayuan dan perkebunan negara/swasta.

Pada tahun 2007 luas penggunaan lahan di Kota Yogyakarta tercatat 3.250 hektar, terdiri dari 98 hektar lahan sawah dan 3.152 hektar lahan bukan sawah.

## 2. Tanaman Pangan

Data tanaman pangan meliputi tanaman padi, palawija dan buah-buahan. Luas panen tanaman padi sawah pada tahun 2007 mencapai 139 hektar dengan produksi 760 ton gabah kering giling. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi padi sawah mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan luas panen.

Produksi palawija yang terdiri dari jagung dan kacang tanah pada tahun 2007 masing-masing 38 ton dan 11,04 ton, dengan luas panen 6 hektar untuk tanaman jagung dan 1 hektar untuk tanaman kacang tanah. Dibandingkan dengan tahun 2006, produksi jagung turun 37 persen, sedangkan produksi kacang tanah juga menurun 90,94 persen. Penurunan produksi jagung dan kacang tanah disebabkan adanya penurunan luas panen dan produktivitasnya.

Tanaman buah-buahan yang paling banyak terdapat di Kota Yogyakarta adalah pisang. Pada tahun 2007 populasi pohon pisang sebanyak 2007 ribu pohon dengan produksi 182,6 ton.

### 3. Tanaman Perkebunan

Komoditi perkebunan tidak cukup efisien untuk wilayah Kota Yogyakarta. Tanaman perkebunan yang paling dominan adalah kelapa. Pada tahun 2007 populasi tanaman kelapa sebanyak 4.238 ton dan 4.110 pohon di antaranya telah menghasilkan dengan total produksi 2.056 ton.

### 4. Perikanan

Produksi perikanan pada tahun 2007 tercatat 237,4 kwintal yang terdiri dari 9,6 kwintal hasil penangkapan di perairan umum, 4,08 kwintal perikanan sawah, 179 kwintal perikanan kolam dan 44,6 kwintal produksi ikan dalam karamba. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya produksi perikanan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan terjadi pada produksi ikan di perairan sawah, sedangkan budidaya ikan mengalami kenaikan.

Produksi benih ikan juga mengalami penurunan. Pada tahun 2006 produksi benih ikan tercatat 265 ribu ekor dan pada tahun 2007 menjadi 149 ribu ekor atau turun sebesar 43,58 persen. Penurunan ini terjadi pada benih ikan lele sebesar 53,82 persen.

### 5. Peternakan

Populasi ternak besar yang terdiri dari kerbau, sapi potong, sapi perah dan kuda pada tahun 2007 secara berturut-turut adalah 17 ekor, 146 ekor, 28 ekor dan 37 ekor.

Sementara itu populasi kambing, domba, babi, dan kelinci yang dikelompokkan sebagai ternak kecil berturut-turut adalah 318 ekor, 506 ekor, 56 ekor dan 88 ekor. Populasi ternak kecil yang banyak terdapat di Kecamatan Kotagede. Populasi unggas yang terdiri dari burung puyuh, ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras, dan itik berturut-turut adalah 3.025 ekor, 2.000 ekor, 62.661 ekor dan 964 ekor.

Jumlah pemotongan ternak pada tahun 2007 tercatat 2.385 ekor sapi, 1.030 ekor kambing, 4.857 ekor domba, dan 189 ekor babi. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jumlah ternak yang paling banyak dipotong adalah ternak domba. Produksi telur tercatat 357.380 butir, atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2006 yang mencapai 195,6 ribu butir.

## **G. Industri**

### **1. Industri**

Industri dibedakan atas industri besar, sedang, kecil dan rumah tangga. Industri besar adalah industri dengan jumlah tenaga kerja 100 orang atau lebih dan industri sedang adalah industri dengan jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang. Perusahaan industri besar dan sedang di Kota Yogyakarta pada tahun 2007 sebanyak 98 perusahaan dengan 7.655 tenaga kerja. Dibandingkan dengan tahun 2006 jumlah

perusahaan industri besar dan sedang mengalami kenaikan sebesar 5,38 persen.

Informasi mengenai industri kecil diperoleh dari Dinas Perekonomian Kota Yogyakarta. Pada tahun 2007 jumlah industri kecil tercatat 5.862 unit dengan jumlah tenaga kerja 30.271 orang dan nilai investasi sebesar Rp. 152.504 juta. Dibandingkan dengan tahun 2006 jumlah usahanya mengalami kenaikan 0,24 persen. Jumlah tenaga kerja yang terserap turun 0,71 persen dan nilai investasinya naik 1,95 persen. Industri kecil yang paling banyak adalah industri pengolahan hasil pertanian dan kehutanan.

## 2. Listrik

Jumlah pelanggan listrik PLN di Kota Yogyakarta pada tahun 2007 tercatat 97.681 pelanggan. Berdasar data dari PLN Distribusi Jawa Tengah cabang Yogyakarta, jumlah pelanggan tercatat 161.396. Namun jumlah tersebut termasuk pelanggan dari Kecamatan Depok Kabupaten Sleman dan Kecamatan Banguntapan kabupaten Bantul. Mayoritas pelanggan adalah rumah tangga yaitu sebesar 88,45 persen, dengan jumlah pemakaian 288.809.421 KWH atau 45,04 persen dari total pemakaian.

## 3. Air Minum

Berdasarkan data dari PDAM Tirtamarta, produksi air minum pada tahun 2007 mencapai 18.415.649 m<sup>2</sup> atau naik 3,90 persen

dibandingkan tahun sebelumnya. Volume air yang disalurkan hanya 10.355.870 m<sup>2</sup> dari total produksi. Jumlah pelanggan pada tahun 2007 tercatat 34.574 pelanggan dan sebagian non niaga yang terdiri dari rumahtangga dan instansi pemerintah. Kelompok pelanggan non niaga berjumlah 32.469 pelanggan, dengan rincian 31.388 pelanggan rumahtangga dan 1.081 instansi pemerintah.

## **H. Perekonomian**

### **1. Ekspor**

Ekspor komoditas bukan migas Kota Yogyakarta pada tahun 2007 mengalami peningkatan dibandingkan ekspor tahun sebelumnya, yaitu dari 25.930.827 US \$ di tahun 2006 menjadi 26.063.497 US \$ di tahun 2007. Sebagian besar ekspor Kota Yogyakarta berasal dari industri kerajinan tangan yang pada umumnya memiliki ciri khas dari suatu daerah sehingga sulit untuk ditiru dan menjadikan komoditas tersebut dapat bersaing di pasar Amerika maupun Eropa. Komoditas mebel kayu memiliki kontribusi terbesar dengan nilai total ekspor mencapai 7.978.064 US \$ atau 30,61 persen dari total ekspor Kota Yogyakarta. Kontribusi terbesar kedua dimiliki oleh komoditas kulit lembaran disamak dengan nilai 5.787.856 US \$ atau mencapai 22,21 persen, dan komoditas minyak Atsiri menempati urutan ketiga dengan nilai ekspor mencapai 4.426.206 US \$ atau 16,98 persen.

## 2. Pasar

Pasar merupakan salah satu tempat kegiatan perekonomian masyarakat yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan dari suatu wilayah/daerah. Jumlah pasar yang terdapat di Kota Yogyakarta pada tahun 2007 mencapai 32 pasar yang menempati lahan seluas 15.009 m<sup>2</sup> dengan 15.423 pedagang. Dari keseluruhan pasar yang ada, sekitar 78,18 persen pasar sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai sedangkan 21,82 persennya merupakan pasar tradisional dengan sarana prasarana yang masih sangat terbatas.

## 3. Persediaan Pangan

Kebutuhan dasar manusia akan pangan, terutama pada makanan pokok yaitu beras menjadi perhatian pemerintah, untuk itu pemerintah selalu menjaga ketersediaannya. Ketersediaan pangan yang diidentikkan dengan ketersediaan beras selama kurun waktu tahun 2007 dapat dikatakan cukup, bahkan melebihi kebutuhan yang dikonsumsi masyarakat Kota Yogyakarta.

Persediaan beras pada gudang dolog terutama ditujukan untuk menjaga tingkat harga konsumen maupun produsen. Total penyaluran beras pada tahun 2007 mencapai 36.075 ton dan total pengadaan mencapai 39.064 ton, sedangkan persediaan beras pada akhir bulan Desember tahun 2006 mencapai 11.850 ton. Jumlah penyaluran beras

terbesar yang dilakukan oleh Dolog yaitu terjadi pada bulan September yang mencapai 5.552 ton.

#### 4. Koperasi

Koperasi yang merupakan soko guru dari perekonomian, menjadi tumpuan kehidupan sebagian besar masyarakat Kota Yogyakarta. Jumlah koperasi yang terdapat di Kota Yogyakarta pada tahun 2007 sebanyak 519 koperasi dengan 54.049 anggota. Rasio jumlah anggota koperasi dengan jumlah rumahtangga di Kota Yogyakarta mencapai 36 persen, berarti menggambarkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta sangat tergantung pada koperasi. Pada tahun 2007 volume usaha koperasi mencapai 121.829 juta, turun 15,51 persen dari tahun sebelumnya dengan sisa hasil usaha mencapai 6.311 juta rupiah.

### **I. Perhubungan**

#### 1. Transportasi

Tersedianya prasarana/infrastruktur yang memadai merupakan salah satu modal dasar untuk meningkatkan kegiatan masyarakat suatu daerah, baik untuk kegiatan yang sifatnya sosial maupun kegiatan perekonomian. Salah satu prasarana/infrastruktur yang pokok adalah jalan. Makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar perdagangan antar daerah.

Panjang jalan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 mencapai 262.275 km dengan rincian: 239.037 km jalan yang sudah diaspal dan 23.238 km jalan kerikil. Panjang jalan yang berada di bawah kewenangan negara 18.132 km, sedangkan 244.143 km berada di bawah kewenangan Kota Yogyakarta. Kondisi jalan secara umum dapat dikatakan layak untuk dilalui, 38,66 persen kondisi jalan baik 42,80 persen kondisi jalan sedang, dan 18,54 persen kondisi jalan rusak.

Untuk memenuhi transportasi darat, tersedia dua jenis kendaraan angkutan darat utama yaitu kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 2007, jumlah kendaraan umum bermotor roda empat atau lebih tercatat sebanyak 9.623 unit. Komposisinya pada tahun 2007 terdiri atas 5,54 persen mobil penumpang umum, 61,10 persen pick up, 20,05 persen truk, 11,18 persen kendaraan bus.

Angkutan kereta api yang ada di Kota Yogyakarta meliputi angkutan untuk penumpang dan barang, yang terdiri dari dua stasiun Tugu yang khusus diperuntukkan bagi pemberangkatan penumpang kereta bisnis dan eksekutif, dan stasiun Lempuyangan yang diperuntukkan bagi pemberangkatan penumpang kereta ekonomi serta barang.

## 2. Pos dan Komunikasi

Jumlah Warung Telekomunikasi (Wartel) dan Kamar Bicara Umum (KBU) di wilayah Kota Yogyakarta pada akhir tahun 2007 ada sebanyak 4.567 buah, yang terbagi ke dalam tiga wilayah stasiun telepon otomatis Kotabaru terdapat 2.826 buah, Pugeran 1.227 buah, dan Kentungan 514 buah. Sedangkan jumlah telepon umum yang ada di tiga wilayah stasiun otomatis tersebut mencapai 93 sambungan.

Lalu lintas surat pos dan giro selama kurun waktu 2007 mencapai 8.322 ribu surat yang dikirim melalui kantor pos yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya surat yang dikirim naik 91,05 persen.

Sarana komunikasi radio merupakan sarana komunikasi elektronik massal yang sampai ini masih banyak digemari masyarakat. Jumlah stasiun radio swasta di wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2007 mencapai 14 stasiun. Stasiun-stasiun tersebut tersebar di wilayah kecamatan Kota Yogyakarta dengan Kecamatan Umbulharjo yang menjadi wilayah konsentrasi stasiun radio swasta.

## BAB V

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### B. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Rasio

##### Kemandirian

##### 1. Menghitung Rasio Kemandirian

- a. Menjumlahkan komponen-komponen realisasi pendapatan asli daerah (PAD) setiap tahun.

Tabel 5.1  
Perkembangan Realisasi PAD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2007  
(dalam rupiah)

No	Pendapatan Asli Daerah	2005	2006	2007
1	Pajak	46.106.723.374,00	43.997.150.025,00	54.783.202.892,00
2	Retribusi	22.797.438.571,50	24.704.781.396,00	29.197.466.013,00
3	Bagian Laba Usaha Daerah	6.651.534.800,72	7.722.505.202,62	8.783.239.359,78
4	Penerimaan Lain-lain	13.640.720.038,48	19.995.019.680,90	21.334.442.677,53
	Total	89.196.416.784,70	96.419.456.304,54	114.098.350.942,31

Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

## b. Menghitung total pendapatan setiap tahun

Tabel 5.2  
Perkembangan Realisasi Total Pendapatan Kota Yogyakarta  
Tahun 2005-2007  
(dalam rupiah)

No	Pendapatan	2005	2006	2007
1	Sisa Lebih Tahun Lalu	73.659.073.376,51	76.983.970.898,15	90.610.460.325,97
2	PAD	89.196.416.784,70	96.419.456.304,52	114.098.350.942,31
3	Bagian Dana Perimbangan	289.257.620.761,54	397.150.853.946,12	439.159.224.538,00
4	Bagian Lain- lain Penerimaan yang Sah	13.432.864.500,00	25.451.927.071,00	62.391.277.000,00
	Total	465.545.975.422,75	596.006.208.219,79	706.259.312.806,28

*Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)*

## c. Membagi pendapatan asli daerah dengan total pendapatan

Tabel 5.3  
Rasio Kemandirian Kota Yogyakarta Tahun 2005-2007

Tahun	PAD (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Rasio Kemandirian
2005	89.196.416.784,70	465.545.975.422,75	19,16%
2006	96.419.456.304,52	596.006.208.219,79	16,78%
2007	114.098.350.942,31	706.259.312.806,28	16,16%

*Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)*

d. Pembahasan

Dari Tabel 5.3 dapat diketahui bahwa kemampuan keuangan daerah yang tercermin di dalam PAD masih sangat rendah sekali. Peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Pola hubungan ini disebut dengan pola hubungan instruktif. Meskipun rasio kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta masih sangat rendah sekali dan mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya tetapi besarnya PAD mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dari Tabel 5.3 dapat diketahui bahwa selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, besarnya rasio kemandirian berkisar antara 16,09%-19,16%:

1. Pada tahun 2005, rasio kemandirian Kota Yogyakarta sebesar 19,16%. Pendapatan asli daerah hanya mampu memberi kontribusi sebesar 19,16% atau sebesar Rp. 89.196.416.784,70 terhadap total pendapatan yaitu sebesar Rp. 465.545.975.422.75. Pada tahun ini kemampuan keuangan daerah Kota Yogyakarta masih sangat rendah yang berarti tidak mampu untuk melakukan otonomi. Total pendapatan Kota Yogyakarta pada tahun ini sebagian besar berasal dari komponen bagian dana perimbangan yaitu sebesar Rp. 289.257.620.761,54 (62,13%) dari total pendapatan.
2. Pada tahun 2006, rasio kemandirian Kota Yogyakarta mengalami penurunan menjadi 16,78%. Pendapatan asli daerah hanya mampu

memberikan kontribusi sebesar 16,78% atau sebesar Rp.96.419.456.304,52 terhadap total pendapatan yaitu sebesar Rp.596.006.208.219.79. Selain kemampuan keuangan daerah pada tahun ini yang masih sangat rendah, rasio kemandirian pada tahun ini juga mengalami penurunan sebesar 2,38% dari tahun sebelumnya. Total pendapatan Kota Yogyakarta pada tahun ini sebagian besar juga berasal dari bagian dana perimbangan yaitu sebesar Rp.397.150.853.946,12 (66,64%) dari total pendapatan.

3. Pada tahun 2007, rasio kemandirian Kota Yogyakarta semakin mengalami penurunan jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya menjadi 16,16%. Pada tahun 2007, pendapatan asli daerah hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 16,16% atau sebesar Rp.114.098.350.942,31 terhadap total pendapatan yaitu sebesar Rp. 706.259.312.806,28. Kemampuan keuangan daerah pada tahun ini masih sangat rendah sekali dengan penurunan sebesar 0,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Total pendapatan Kota Yogyakarta pada tahun ini sebagian besar juga berasal dari bagian dana perimbangan yaitu Rp.439.159.224.538,00 (61,91%) dari total pendapatan.

## 2. Perkembangan Rasio Kemandirian Kota Yogyakarta

Untuk mengetahui perkembangan rasio kemandirian digunakan metode kuadrat terkecil (*least square*) dalam menentukan trend, dengan rumus:

$$Y' = a + bX$$

Tabel 5.4  
Tabel Trend Rasio Kemandirian Kota Yogyakarta Tahun 2005-2007

Tahun	Rasio Kemandirian (Y)	X	XY	X <sup>2</sup>	Y'
2005	19,16%	-1	-19,16%	1	18,87
2006	16,78%	0	0	0	17,37
2007	16,16%	1	16,16%	1	15,87
Total	52,1%	0	-3%	2	52,11

Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

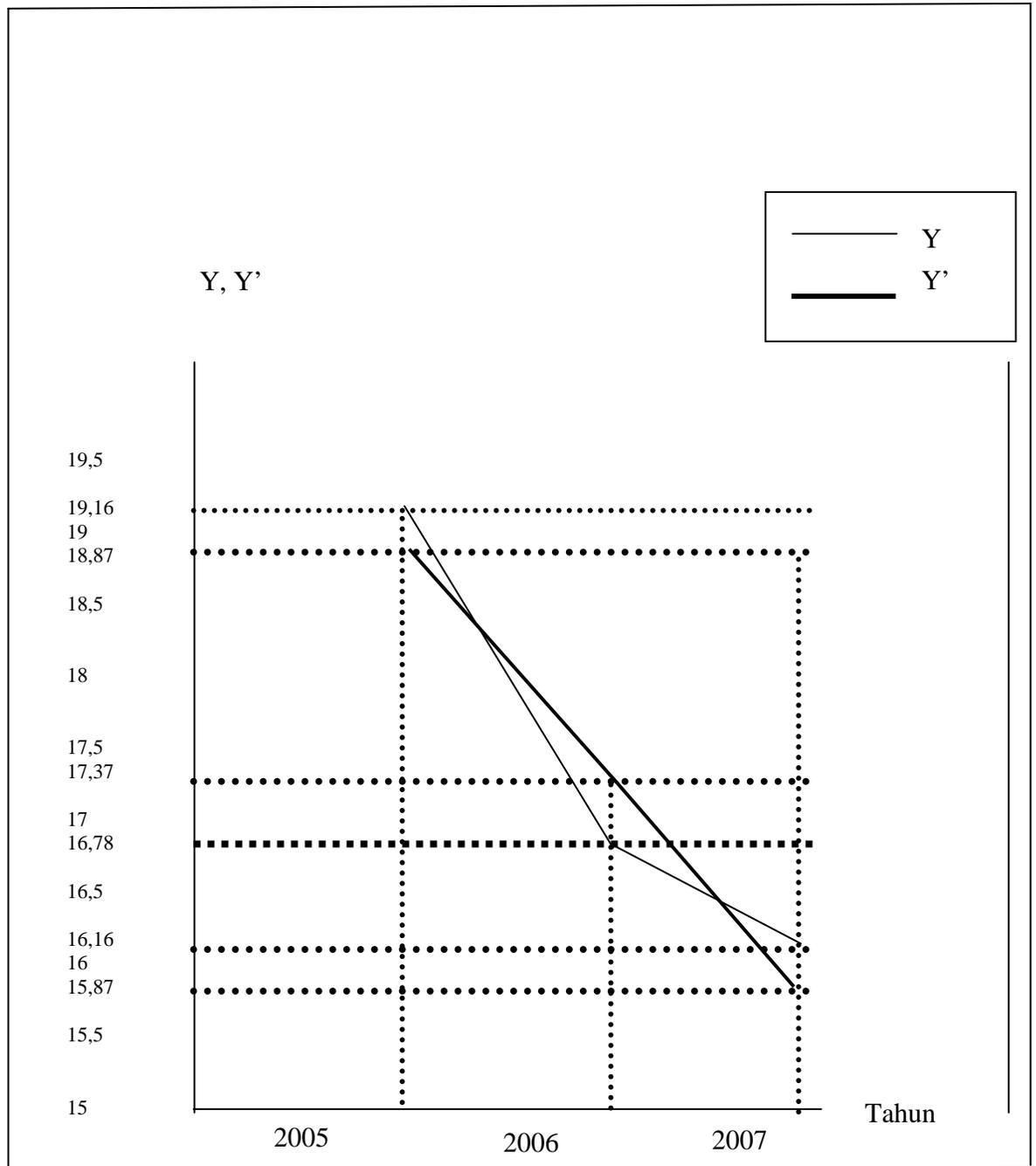
Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{52,1}{3} = 17,37$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-3}{2} = -1,5$$

Dari Tabel 5.4 dapat diketahui bahwa rasio kemandirian Kota Yogyakarta cenderung menurun yang berkisar antara 18,87% sampai dengan 15,87%. Dari perhitungan diatas diketahui bahwa rata-rata tingkat kemandirian Kota Yogyakarta untuk setiap tahun adalah 17,37% dan setiap tahun mengalami penurunan sebesar 1,5%.

Untuk penjelasan Tabel trend rasio kemandirian diatas dapat dilihat pada grafik berikut



Gambar 5.1

**Trend Rasio Kemandirian**

**B. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi.**

3. Menghitung Rasio Efektivitas PAD

- a. Menjumlahkan komponen-komponen realisasi pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta setiap tahun (Tabel 5.1)
- b. Menjumlahkan komponen-komponen target penerimaan pendapatan asli daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah setiap tahun.

Tabel 5.5  
Perkembangan Target PAD Kota Yogyakarta Tahun 2005-2007  
(dalam rupiah)

No	Pendapatan Asli Daerah	2005	2006	2007
1	Pajak	43.365.000.000,00	42.678.850.000,00	49.274.000.000,00
2	Retribusi	23.122.648.000,00	25.028.663.530,00	29.092.692.000,00
3	Bagian Laba Usaha Daerah	6.651.516.000,00	6.885.906.000,00	8.799.505.000,00
4	Penerimaan Lain-lain	11.196.188.000,0 0	20.664.074.470,00	16.996.685.000,00
	Total	84.335.352.000,00	95.257.494.000,00	104.162.882.000,00

*Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)*

- c. Membagi realisasi pendapatan asli daerah dengan target penerimaan pendapatan asli daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah

Tabel 5.6  
Rasio Efektivitas Kota Yogyakarta Tahun 2005-2007

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektivitas
2005	89.196.416.784,70	84.335.352.000,00	105,76%
2006	96.419.456.304,52	95.257.494.000,00	101,22%
2007	114.098.350.942,31	104.162.882.000,00	109,54%

*Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)*

d. Pembahasan

Dari Tabel 5.6 dapat diketahui bahwa tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 mengalami penurunan dan tahun 2007 rasio efektivitas mengalami peningkatan bahkan mampu melampaui target yang ditetapkan.

1. Pada tahun 2005 rasio efektivitas mencapai 105,76% yang berarti bahwa pada tahun tersebut pemungutan PAD sudah efektif karena kontribusi yang diberikan pada tahun itu lebih dari 100% yang berarti melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2005 pemerintah menargetkan PAD sebesar Rp.84.335.352.000,00 sementara besarnya realisasi PAD pada tahun tersebut sebesar Rp.89.196.416.784,70 yang berarti ada kelebihan target sebesar Rp.4.861.064.784,70.
2. Pada tahun 2006 rasio efektivitas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 101,22%, namun pada tahun ini pemungutan PAD sudah sangat efektif karena kontribusi yang diberikan pada tahun

itu lebih dari 100% yang berarti melebihi target yang ditetapkan. Besarnya target PAD pada tahun 2006 sebesar Rp.95.257.494.000,00 sementara besarnya realisasi PAD pada tahun tersebut Rp.96.419.456.304,52 yang berarti ada kelebihan target sebesar Rp.1.161.962.304,52.

3. Pada tahun 2007 rasio efektivitas mencapai 109,54% yang berarti mengalami peningkatan sebesar 8,32% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2007 pemerintah menargetkan PAD sebesar Rp.104.162.882.000,00 sementara realisasi yang dicapai sebesar Rp.114.098.350.942,31. Pada tahun ini berarti ada kelebihan target sebesar Rp.9.935.468.942,31. Dengan demikian pada tahun 2007 pemerintah sudah efektif dalam menjalankan tugasnya karena besarnya realisasi PAD yang dicapai semakin meningkat.

#### 4. Perkembangan Rasio Efektivitas PAD Kota Yogyakarta

Untuk mengetahui perkembangan rasio efektivitas digunakan metode kuadrat terkecil (*least square*) dalam menentukan trend, dengan rumus:

$$Y' = a + bX$$

Tabel 5.7  
Tabel Trend Rasio Efektivitas Pemungutan PAD Kota Yogyakarta

Tahun	Rasio Efektivitas (Y)	X	XY	X <sup>2</sup>	Y'
2005	105,76%	-1	-105,76%	1	103,62%
2006	101,22%	0	0	0	105,51%
2007	109,54%	1	109,54%	1	107,4%
Total	316,52%	0	3,78%	2	316,53%

Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

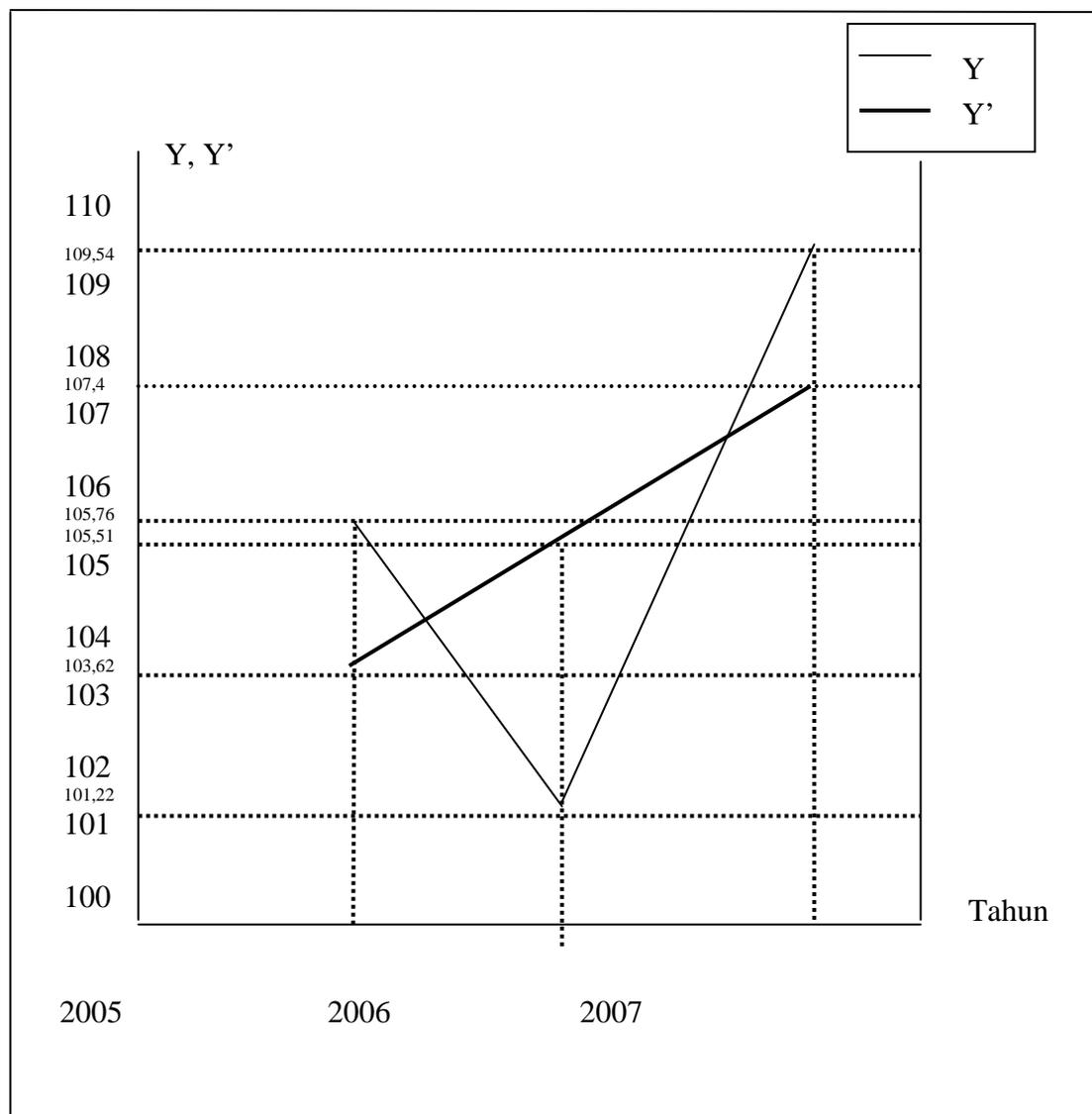
Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{316,52}{3} = 105,51$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{3,78}{2} = 1,89$$

Dari Tabel 5.7 dapat diketahui bahwa pemungutan PAD di Kota Yogyakarta cenderung efektif karena kontribusi yang diberikan terhadap target rata-rata setiap tahunnya adalah sebesar 105,51% dengan peningkatan 1,89% setiap tahun. Kinerja pemerintah Kota Yogyakarta cenderung makin membaik dilihat dari peningkatan rasio efektivitas untuk setiap tahunnya.

Untuk memperjelas Tabel trend efektivitas di atas dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



**Gambar 5.2**

### **Trend Rasio Efektivitas**

## 5. Menghitung Rasio Efisiensi PAD

- a. Menjumlahkan komponen-komponen biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah setiap tahun.
- b. Menjumlahkan komponen-komponen realisasi penerimaan pendapatan asli daerah setiap tahun.

Tabel 5.8  
Rasio Efisiensi Kota Yogyakarta Tahun 2005-2007

Tahun	Biaya Pemungutan PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Rasio Efisiensi
2005	1.547.351.321,15	89.196.416.784,70	1,73%
2006	1.355.743.461,00	96.419.456.304,52	1,41%
2007	1.794.882.430,40	114.098.350.942,31	1,57%

*Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)*

### c. Pembahasan

Dari Tabel 5.8 dapat dilihat bahwa selama tahun 2005 hingga tahun 2007 besarnya rasio efisiensi yang dicapai dibawah 100% yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah telah efisien.

1. Pada tahun 2005 rasio efisiensi sebesar 1,73% hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PAD sudah efisien.
2. Pada tahun 2006 nilai efisiensi mengalami penurunan sebesar 0,32% dari tahun sebelumnya yaitu menjadi 1,41%. Penurunan nilai efisiensi

ini menunjukkan bahwa pemungutan PAD tahun 2006 lebih efisien jika dibandingkan dengan pemungutan PAD pada tahun 2005.

3. Pada tahun 2007 nilai efisiensi mengalami peningkatan sebesar 0,16% dari tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 1,57% yang berarti pemungutan PAD pada tahun tersebut belum efisien jika dibandingkan tahun sebelumnya.

#### 4. Perkembangan Rasio Efisiensi PAD Kota Yogyakarta

Untuk mengetahui perkembangan rasio efisiensi digunakan metode kuadrat terkecil (*least square*) dalam menentukan trend, dengan rumus:

$$Y' = a + bX$$

Tabel 5.9  
Tabel Trend Rasio Efisiensi Kota Yogyakarta Tahun 2005-2007

Tahun	Rasio Efisiensi (Y)	X	XY	X <sup>2</sup>	Y'
2005	1,73%	-1	-1,73	1	1,65
2006	1,41%	0	0	0	1,57
2007	1,57%	1	1,57	1	1,49
Total	4,71%	0	-0,16	2	4,71

*Sumber data: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)*

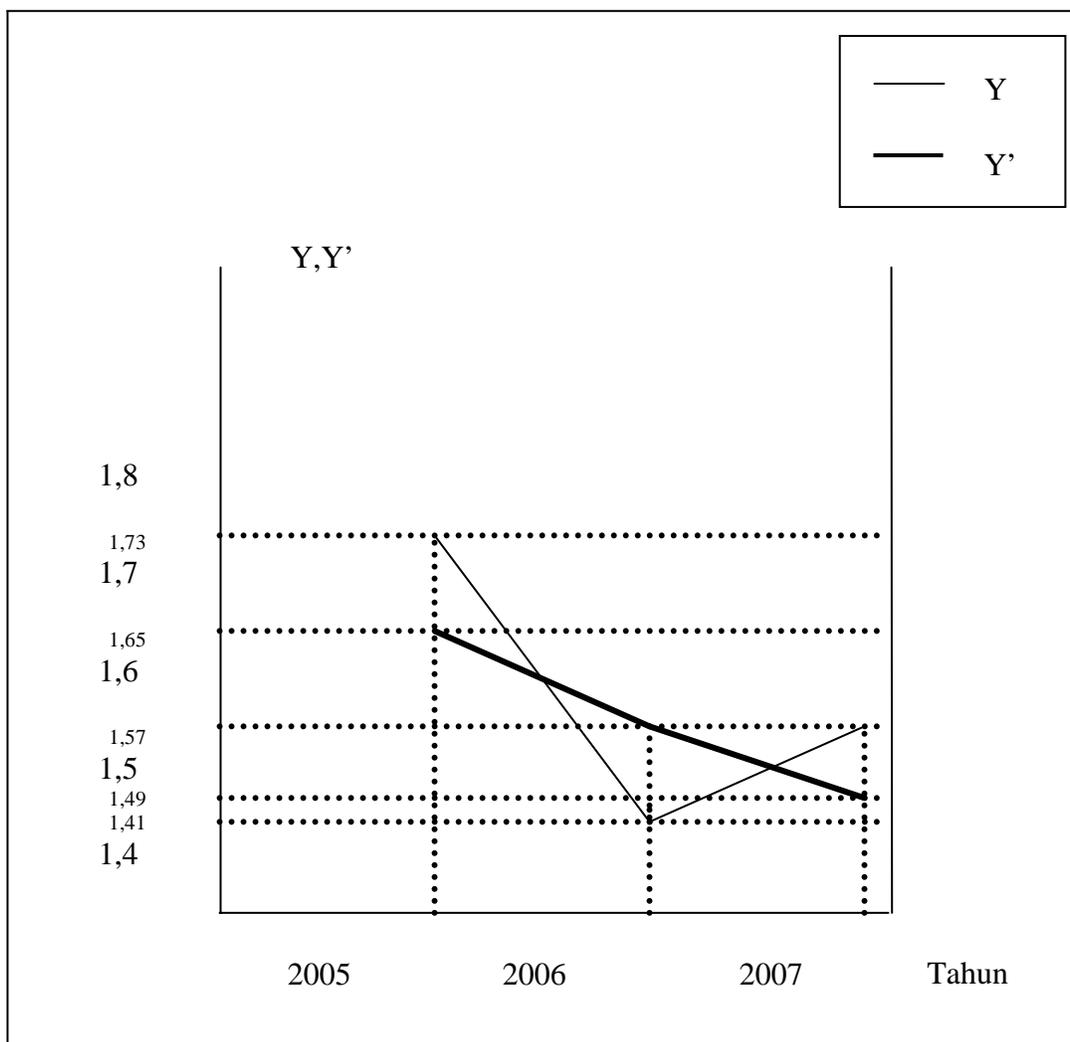
Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus:

$$a = \frac{\sum Y}{n} = \frac{4,71}{3} = 1,57$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum X^2} = \frac{-0,16}{2} = -0,08$$

Dari Tabel 5.9 di atas dapat diketahui bahwa biaya pemungutan PAD cenderung efisien karena rasio efisiensi kurang dari 100% yaitu rata-rata setiap tahun sebesar 1,57%. Pemungutan PAD setiap tahun semakin efisien yang ditandai dengan menurunnya persentase nilai efisiensi pemungutan PAD sebesar 0,08%.

Untuk memperjelas Tabel trend rasio efisiensi di atas dapat dilihat pada grafik berikut:



**Gambar 5.3**

**Trend Rasio Efisiensi**

### C. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari Rasio Pertumbuhan

1. Menghitung pertumbuhan dari masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran.

Tabel 5.10  
Rasio Pertumbuhan Kota Yogyakarta Tahun 2005-2007  
(dalam rupiah)

No	Keterangan	2005	2006	2007
1	PAD		96.419.456.304,52	114.098.350.942,31
2	Pertumbuhan PAD	89.196.416.784,70	8,09%	18,34%
3	Total Pendapatan	391.886.902.046,24	519.022.237.321,64	615.648.852.480,31
4	Pertumbuhan Total Pendapatan	-	32,44%	18,62%
5	Belanja Administrasi Umum	217.948.923.187,82	274.882.323.290,30	-
6	Pertumbuhan Belanja Administrasi Umum	-	26,12%	-
7				
8	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	64.145.947.212,00	73.338.332.547,00	476.583.025.119,55
	Pertumbuhan Belanja Operasi dan Pemeliharaan	-	14,33%	549,84%

Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

Tabel 5.10  
Rasio Pertumbuhan Kota Yogyakarta Tahun 2005-2007  
(Lanjutan)  
(dalam rupiah)

9	Belanja Modal	70.187.647.817,93	79.402.057.074,00	89.982.396.168,00
10	Pertumbuhan Belanja Modal	-	13,13%	13,33%
11	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	45.118.547.802,70	59.411.518.162,00	-
12	Pertumbuhan Belanja Bagi Hasil dan Bantua Keuangan	-	31,68%	-
13	Belanja Tidak Tersangka	1.843.536.350,00	9.734.745.979,00	2.554.951.274,41
14	Pertumbuhan Belanja Tidak Tersangka	-	428,05%	(73,75%)

Sumber: DPDPK Kota Yogyakarta (data diolah)

## 2. Pembahasan

Dari perhitungan rasio tabel 5.10 di atas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan APBD Kota Yogyakarta pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 menunjukkan pertumbuhan dan cenderung meningkat, namun pada

pertumbuhan total pendapatan dan pertumbuhan belanja tidak tersangka mengalami penurunan.

Pada komponen PAD tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 peningkatan sebesar 8,09% atau sebesar Rp.7.223.039.519,82. Tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 10,25% atau sebesar Rp.17.678.894.637,79

Pada komponen total pendapatan tahun 2005 sampai dengan 2006 mengalami peningkatan sebesar 32,44% atau sebesar Rp.127.135.335.275,40. Tahun anggaran 2006 sampai 2007 mengalami penurunan sebesar 13,82% atau sebesar Rp.96.626.615.158,77.

Pada komponen belanja administrasi umum tahun 2005 sampai dengan 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 26,12% atau sebesar Rp.56.933.400.102,48. Karena pada tahun 2005 dan tahun 2006 data yang digunakan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 dan pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006. Sehingga pada tahun 2007 tidak lagi terdapat komponen belanja administrasi umum, sehingga nominalnya kosong, dengan kata lain dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 tidak mengalami peningkatan.

Pada komponen belanja operasi dan pemeliharaan tahun 2005 sampai dengan 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 14,33% atau sebesar Rp.9.192.385.335,00. Tahun anggaran 2006 sampai 2007 mengalami peningkatan sebesar 535,51% atau sebesar Rp.403.244.692.572,55.

Pada komponen belanja modal tahun 2005 sampai dengan 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 13,13% atau sebesar Rp.9.241.409.256,7. Tahun anggaran 2006 sampai 2007 mengalami peningkatan sebesar 0,2% atau sebesar Rp.10.580.339.094,00.

Pada komponen belanja bagi hasil dan bantuan keuangan tahun 2005 sampai dengan 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 31,68% atau sebesar Rp.14.292.970.359,30. Karena pada tahun 2007 Pemerintah Daerah tidak mengeluarkan bantuan keuangan ke pihak manapun, sehingga pada tahun 2007 pada komponen Belanja Bagi Hasil dan bantuan keuangannya nominalnya kosong, sehingga tidak ada peningkatan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007.

Pada komponen belanja tak tersangka tahun 2005 sampai dengan 2006 mengalami pertumbuhan sebesar 428,05% atau sebesar Rp.7.891.209.629,00. Tahun anggaran 2006 sampai 2007 mengalami penurunan sebesar 354,30% atau sebesar Rp.7.179.594.704,59.

#### **D. Perkembangan Keuangan Kota Yogyakarta Ditinjau dari *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)***

1. Menghitung DSCR dengan membandingkan antara penjumlahan pendapatan asli daerah, dana bagi hasil setelah dikurangi dengan dana bagi hasil dana reboisasi serta dana alokasi umum setelah dikurangi belanja wajib dengan penjumlahan angsuran pokok pinjaman, bunga dan biaya lain-lain.

**Tahun 2005**

$$\begin{aligned}
 \text{DSCR} &= \frac{(\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}) - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + (\text{Biaya administrasi masa} \\
 &\quad \text{tenggang} + \text{Biaya administrasi berjalan} + \text{Jasa Bank})} \\
 &= \frac{(89.196.416.784,70 + (81.426.620.761,54) + \\
 &\quad 201.231.000.000,00) - (24.350.880.584,30 + 168.033.445.090,00)}{4.988.975.338,87 + 1.562.985.580,12 + (582.067.800,00 + \\
 &\quad 410.600.000,00 + 31.205.005,70)} \\
 &= \frac{371.854.037.546,24 - 192.384.325.674,30}{4.988.975.338,87 + 1.562.985.580,12 + 1.023.872.805,70} \\
 &= \frac{179.469.711.871,94}{7.575.833.724,99} \\
 &= 23,69
 \end{aligned}$$

**Tahun 2006**

$$\begin{aligned}
 \text{DSCR} &= \frac{(\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}) - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + (\text{Biaya administrasi} + \text{biaya} \\
 &\quad \text{administrasi masa tenggang} + \text{biaya administrasi berjalan} + \text{Jasa} \\
 &\quad \text{Bank})}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (96.419.456.304,52+(75.518.853.946,12)+ \\
&\quad 316.832.000.000,00)-(31.767.147.021,00+214.869.182.552,00) \\
&\quad \hline
&\quad 958.824.221,52 \quad + \quad 349.412.739,54 \quad + \quad (66.994.100,46 \quad + \\
&\quad 129.348.400,00 + 155.050.000,00 + 7.106.214,33) \\
&= \frac{488.770.310.250,64 - 246.636.329.573,00}{958.824.221,52 + 349.412.739,54 + 358.498.714,79} \\
&= \frac{242.133.980.677,64}{1.666.735.675,85} \\
&= 145,27
\end{aligned}$$

**Tahun 2007**

$$\begin{aligned}
\text{DSCR} &= \frac{(\text{PAD} + (\text{DBH} - \text{DBHDR}) + \text{DAU}) - \text{Belanja Wajib}}{\text{Angsuran Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Jasa Bank}} \\
&= \frac{(114.098.350.942,31+(47.329.224.538,00)+ \\
&\quad 365.042.000.000,00) - 332.205.140.033,00}{860.238.188,19 + 448.314.574,08 + 129.640.808,05}
\end{aligned}$$

$$= \frac{365.042.000.000,00 - 332.205.140.033,00}{1.438.193.570,32}$$

$$= \frac{32.836.859.967,00}{1.438.193.570,32}$$

$$= 22,83$$

## 2. Pembahasan

### **Tahun 2005**

Pada perhitungan DSCR dari tahun 2005 sampai dengan 2007, pada komponen DBHDR tidak ada nominalnya karena Pemerintah Kota tidak memiliki hutan, sehingga Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi nominalnya kosong. Pada komponen Belanja Wajib itu sendiri merupakan Belanja Pegawai, baik yang digunakan untuk membayar gaji ataupun honor.

Pada tahun 2005, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai DSCR sebesar 23,69 yang berarti pemerintah daerah dilihat dari kemampuan keuangannya layak untuk melakukan pinjaman karena nilai DSCRnya lebih dari 2,5 yaitu sebesar 23,69. Maka hal tersebut mengidentifikasi terjadinya arus kas positif yang berarti pendapatan cukup untuk menutupi seluruh beban utang berupa angsuran pokok dan bunga beserta biaya lainnya.

Maka nilai DSCR sebesar 23,69 berarti pemerintah daerah memiliki pendapatan setelah dikurangi belanja wajib yang cukup untuk menutupi 2369% beban utang pada tahun tersebut.

### **Tahun 2006**

Pada tahun 2006, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai DSCR sebesar 145,27 yang berarti pemerintah daerah dilihat dari kemampuan keuangannya tidak layak untuk melakukan pinjaman karena nilai DSCRnya lebih dari 2,5 yaitu 145,27. Maka hal tersebut mengidentifikasikan terjadinya arus kas positif yang berarti pendapatan cukup untuk menutupi seluruh beban utang berupa angsuran pokok dan bunga beserta biaya lainnya.

Maka nilai DSCR sebesar 145,27 berarti pemerintah daerah hanya memiliki pendapatan setelah dikurangi belanja wajib yang cukup untuk menutupi 14527% beban utang pada tahun tersebut.

### **Tahun 2007**

Pada tahun 2007, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai DSCR sebesar 22,83 yang berarti pemerintah daerah dilihat dari kemampuan keuangannya layak untuk melakukan pinjaman karena nilai DSCRnya lebih dari 2,5 yaitu sebesar 22,83. Maka hal tersebut mengidentifikasikan terjadinya arus kas positif yang berarti pendapatan cukup untuk menutupi seluruh beban utang berupa angsuran pokok dan bunga beserta biaya lainnya.

Maka nilai DSCR sebesar 22,83 berarti pemerintah daerah memiliki pendapatan setelah dikurangi belanja wajib yang cukup untuk menutupi 2283% beban utang pada tahun tersebut.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian Kota Yogyakarta yang diukur melalui Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai rata-rata sebesar 17,37% untuk setiap tahun dengan penurunan sebesar 1,5% tiap tahun. Kondisi ini berarti bahwa bila ditinjau dari kemampuan keuangan daerahnya maka Kota Yogyakarta belum mampu melaksanakan otonomi daerah. Kota Yogyakarta mempunyai pola hubungan instruktif (lihat tabel 2.1) yang berarti bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah.
2. Rasio efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 mencapai rata-rata 105,51% dengan peningkatan sebesar 1,89% tiap tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemungutan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta telah efektif karena kontribusi yang diberikan telah melebihi target. Sedangkan rasio efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 mencapai rata-rata 1,57%. Kondisi ini menunjukkan bahwa biaya pemungutan Pendapatan Asli Daerah cenderung efisien karena rasio efisiensi kurang dari 100%. Terjadinya penurunan nilai

efisiensi sebesar 0,08% menunjukkan bahwa pemungutan Pendapatan Asli Daerah semakin efisien pada setiap tahun.

3. Rasio pertumbuhan APBD pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada komponen total pendapatan yang mengalami penurunan sebesar 13,82% dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 dan komponen belanja tidak langsung yang mengalami penurunan sebesar 354,30% dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2007.
4. DSCR Kota Yogyakarta dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah layak untuk melakukan pinjaman karena nilai DSCRnya lebih dari 2,5.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Karena keterbatasan waktu dan biaya, maka penulis hanya melakukan penelitian pada rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio pertumbuhan, dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) pada tahun 2005-2007.

## **C. Saran**

- a. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Sebaiknya Pemerintah Kota Yogyakarta mempertahankan efektivitas dan efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah efektif dan efisien serta berusaha untuk terus meningkatkannya. Cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dengan melakukan intensifikasi Pendapatan Asli Daerah yaitu memperbesar penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Selain itu dapat pula dilakukan ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan meningkatkan jumlah obyek dan subyek pajak atau retribusi daerah. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat diperoleh bila pemerintah melakukan pembangunan-pembangunan baru, seperti pembangunan pasar dan terminal

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Peneliti selanjutnya dapat pula menghitung besarnya rasio aktivitas yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Namun belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.
2. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian sejenis namun dengan membandingkan kinerja dua pemerintah daerah yang berbeda yang mempunyai kondisi hampir sama.
3. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian sejenis , namun dengan menambah jumlah tahun yang diteliti dan menambah jenis rasio yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2008. *Kota Yogyakarta dalam Angka*. Yogyakarta: Haksoro
- Bastian, Indra (2001). *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Pengembangan Akuntansi FE\_UGM
- Budisantoso. 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Gorontalo: PT Indeks
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSKK-UGM
- Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- K. Coe, Charles, *Preventing Local Government Fiscal Crises: The North Carolina*
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mahsun, Mohamad, Firma Sulistiyowati, dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Muryani. 2005. Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan Analisis Rasio Keuangan Laporan Perhitungan APBD. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma.
- Nadeak, Ruslina. 2003. Analisis Rasio keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta

Pemerintah Kota Yogyakarta. 2005-2007. *Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Yogyakarta

Prihminto, Widodo. 2000. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Indeks

Republik Indonesia. 2005. *Undang-Undang Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

R. Mullins, Daniel & A. Pagano, Michael. *Local Budgeting and Finance: 25 Years of Development*

Subardi, Agus. 1994. *Manajemen Keuangan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Sularmi & Suwarno Endro. 2006. "Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Ditinjau Aspek Keuangan". *Jurnal Akuntansi dan keuangan Vol. 5, No. 1, April 2000: 28-35*

Susilo. 2001. *Petunjuk pembukuan pengelolaan kas dan pertanggung jawaban bendaharawan*. Jakarta: Mini Jaya Abadi.

Syafaruddin, Alwi. 1989. *Alat-Alat Analisis Dalam Pembelajaran*. Yogyakarta: Andi Offset.

Widowati, Eliasari. 2006. *Analisis Kinerja Keuangan Pada APBD Kabupaten Sleman. Skripsi*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

Wijaya, Tony. 2007. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pembangunan Pada Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta". *Modus Vol. 19, No. 2, 2007: ISSN 0852-1875*

*www.yogyakarta.bps.go.id*

# LAMPIRAN

RINGKASAN REALISASI APBD PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA							
NOMOR	URAIAN	TA. 2003		TA. 2004		TA. 2005	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
<b>I PENDAPATAN</b>							
1	Pendapatan Asli Daerah	56,822,010,000.00	68,621,564,311.07	70,412,081,000.00	79,911,419,100.82	84,335,352,000.00	89,196,416,784.70
1.1	Pajak Daerah	32,068,358,000.00	33,526,514,267.53	38,149,900,000.00	40,581,980,256.00	43,365,000,000.00	46,106,723,374.00
1.1.2	Retribusi Daerah	15,718,585,000.00	16,093,220,398.50	18,269,452,000.00	18,995,046,383.00	23,122,648,000.00	22,797,438,571.50
1.1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2,509,235,000.00	4,081,649,388.86	5,188,903,000.00	5,285,786,650.47	6,651,516,000.00	6,651,534,800.72
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	6,525,832,000.00	14,920,180,256.18	8,803,826,000.00	15,048,605,811.35	11,196,188,000.00	13,640,720,038.48
1.2	Dana Perimbangan	238,756,313,000.00	253,512,731,343.07	252,390,201,000.00	269,967,630,200.69	268,347,705,000.00	289,257,620,761.54
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	25,458,673,000.00	32,300,731,328.00	29,583,201,000.00	37,889,440,614.00	32,791,705,000.00	37,894,010,508.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	196,100,000,000.00	196,100,000,000.00	197,787,000,000.00	197,787,000,000.00	201,231,000,000.00	201,231,000,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00	6,600,000,000.00	6,600,000,000.00
1.2.4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	12,997,640,000.00	20,912,000,015.07	19,520,000,000.00	28,791,189,586.69	27,725,000,000.00	43,532,610,253.54
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	7,841,710,000.00	16,496,466,000.00	18,342,100,000.00	19,770,829,733.00	15,543,000,000.00	13,432,864,500.00
1.3.1	Bantuan Dana Kontijensi/ Penyumbang dari Pemerintah	7,841,710,000.00	16,496,466,000.00	5,043,100,000.00	6,471,829,733.00	-	-
1.3.1.02	Bantuan Dana Kontijensi/ Penyumbang dari Pemerintah	-	-	5,043,100,000.00	6,471,829,733.00	-	-
1.3.1.03	Dana penyesuaian Ad Hoc	-	-	13,299,000,000.00	13,299,000,000.00	11,943,000,000.00	11,943,000,000.00
1.3.1.04	Hibah	-	-	-	-	3,600,000,000.00	1,489,864,500.00
<b>JUMLAH PENDAPATAN:</b>		<b>303,420,033,000.00</b>	<b>338,630,761,654.14</b>	<b>341,144,382,000.00</b>	<b>369,649,879,034.51</b>	<b>368,226,057,000.00</b>	<b>391,886,902,046.24</b>
<b>II BELANJA</b>							
2	APARATUR DAERAH	62,807,668,122.00	52,950,511,131.94	65,747,492,320.00	58,351,605,850.29	70,775,136,313.00	64,390,925,069.82
2.1	Belanja Administrasi Umum	26,581,823,882.00	19,447,043,068.94	32,042,509,295.00	29,273,749,713.29	31,216,908,010.00	28,980,600,331.82
2.1.1	1 Belanja Pegawai/Personalia	22,382,820,474.00	16,125,537,328.00	26,870,363,830.00	24,609,311,893.45	26,218,096,337.00	24,350,880,584.30
2.1.1.2	2 Belanja Barang dan Jasa	2,738,243,168.00	2,241,175,420.94	3,505,142,055.00	3,119,937,359.84	3,231,814,453.00	3,058,801,526.52
2.1.1.3	3 Belanja Perjalanan Dinas	786,598,000.00	507,729,950.00	977,284,000.00	940,748,210.00	854,373,000.00	801,593,680.00
2.1.1.4	4 Belanja Pemeliharaan	674,162,240.00	572,600,370.00	689,739,410.00	603,752,250.00	912,624,220.00	769,324,541.00
2.1.2	1 Belanja Operasi & Pemeliharaan	18,366,162,540.00	16,480,358,307.00	21,210,632,125.00	18,633,614,620.00	23,553,179,103.00	20,844,064,912.00
2.1.2.1	2 Belanja Pegawai/Personalia	5,943,024,200.00	5,599,982,430.00	5,387,633,150.00	5,015,665,100.00	6,577,330,250.00	5,951,909,400.00
2.1.2.2	2 Belanja Barang dan Jasa	10,975,955,840.00	9,866,365,117.00	12,825,627,025.00	11,309,399,890.00	14,315,903,453.00	12,634,703,372.00
2.1.2.3	3 Belanja Perjalanan Dinas	1,010,969,000.00	700,026,000.00	2,365,369,900.00	1,828,024,500.00	2,161,673,000.00	1,841,455,690.00
2.1.2.4	4 Belanja Pemeliharaan	436,213,500.00	313,984,760.00	632,002,050.00	480,325,130.00	498,272,400.00	415,996,450.00
2.1.3	Belanja Modal	17,859,681,700.00	17,023,110,756.00	12,494,350,900.00	10,444,241,517.00	16,005,049,200.00	14,566,259,826.00
2.2	BELAYANAN PUBLIK	284,849,295,261.00	252,400,520,295.50	349,459,699,097.00	311,988,969,919.75	379,874,870,591.00	334,853,680,300.63
2.2.1	Belanja Administrasi Umum	186,898,710,462.00	166,942,266,025.00	210,531,212,085.00	188,939,446,086.75	206,850,889,421.00	188,968,325,856.00
2.2.1.1	1 Belanja Pegawai/Personalia	163,724,462,089.00	145,745,589,574.00	186,318,616,267.00	168,218,395,138.75	182,842,291,930.00	168,033,445,090.00
2.2.1.2	2 Belanja Barang dan Jasa	16,497,152,559.00	15,028,467,895.00	17,421,784,058.00	14,288,185,058.00	16,367,006,461.00	13,742,583,438.00
2.2.1.3	3 Belanja Perjalanan Dinas	1,490,959,030.00	1,406,948,597.00	2,113,475,400.00	1,985,138,492.00	1,918,786,000.00	1,813,068,550.00
2.2.1.4	4 Belanja Pemeliharaan	5,186,136,784.00	4,761,259,959.00	4,877,335,760.00	4,447,727,398.00	5,722,805,030.00	5,379,228,778.00
2.2.2	Belanja Operasi & Pemeliharaan	28,550,000,880.00	26,813,257,737.50	38,887,655,965.00	36,817,724,255.00	46,963,795,025.00	43,301,882,300.00
2.2.2.1	1 Belanja Pegawai/Personalia	5,660,534,637.00	5,207,682,216.50	6,971,966,625.00	6,439,565,413.00	9,031,810,490.00	8,479,043,400.00
2.2.2.2	2 Belanja Barang dan Jasa	13,877,536,355.00	12,928,295,375.00	21,173,814,125.00	20,059,410,552.00	23,977,871,135.00	22,051,546,267.00
2.2.2.3	3 Belanja Perjalanan Dinas	1,440,103,000.00	1,297,025,030.00	3,265,302,900.00	3,043,713,100.00	4,771,235,000.00	4,212,346,690.00
2.2.2.4	4 Belanja Pemeliharaan	7,571,826,888.00	7,380,255,116.00	7,476,572,315.00	7,075,035,190.00	9,182,869,400.00	8,558,945,943.00
2.2.3	Belanja Modal	46,128,974,703.00	41,117,455,909.00	56,004,154,896.00	50,260,339,372.00	61,189,780,925.00	55,621,387,991.93
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	17,671,609,216.00	17,172,995,474.00	32,036,676,151.00	30,974,792,481.00	47,870,405,220.00	45,118,547,802.70
2.4	Belanja Tidak Tersangka	5,600,000,000.00	354,545,150.00	12,000,000,000.00	4,996,667,725.00	17,000,000,000.00	1,843,536,350.00
<b>JUMLAH BELANJA: Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN - BELANJA)</b>		<b>347,656,363,383.00</b>	<b>305,351,032,427.44</b>	<b>415,207,191,417.00</b>	<b>370,340,575,770.04</b>	<b>450,650,006,904.00</b>	<b>399,244,605,370.45</b>
		<b>(44,236,930,383.00)</b>	<b>33,279,729,226.70</b>	<b>(74,062,809,417.00)</b>	<b>(690,696,735.53)</b>	<b>(82,423,949,904.00)</b>	<b>(7,357,703,324.21)</b>
NOMOR	URAIAN	TA. 2003		TA. 2004		TA. 2005	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
<b>III PEMBIAYAAN</b>							
3	Penerimaan Daerah	-	-	-	-	-	-
3.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	57,869,791,627.00	57,456,145,471.67	77,898,420,998.00	77,137,955,980.87	72,622,268,370.00	73,659,073,376.51
3.1.2	Transfer dari Dana Cadangan	-	-	18,500,000,000.00	18,500,000,000.00	19,036,041,445.00	19,036,041,445.00
3.1.3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Hasil Perjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3.1.5	Hibah	10,769,529,417.00	10,769,529,417.00	-	-	-	-
<b>Jumlah Penerimaan Daerah</b>		<b>68,639,321,044.00</b>	<b>68,225,674,888.67</b>	<b>96,398,420,998.00</b>	<b>95,637,955,980.87</b>	<b>91,658,309,815.00</b>	<b>92,695,114,821.51</b>
3	Pengeluaran Daerah	-	-	-	-	-	-
3.2	Transfer Ke Dana Cadangan	5,530,465,622.00	5,530,465,622.00	11,267,142,598.00	11,267,142,598.00	-	-
3.2.2	Penyerahan Modal	17,839,529,417.00	17,836,550,642.20	8,500,000,000.00	8,489,379,793.83	6,446,042,500.00	6,446,041,672.80
3.2.3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	1,032,395,622.00	1,000,431,870.30	2,568,468,983.00	2,568,468,483.00	1,032,600,000.00	1,032,398,926.35
3.2.4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	-	-	-	-	880,717,411.00	76,983,970,898.15
3.2.5	Pembelian Piutang Daerah	-	-	-	-	875,000,000.00	875,000,000.00
<b>Jumlah Pengeluaran Daerah</b>		<b>24,402,390,661.00</b>	<b>101,505,404,115.37</b>	<b>22,335,611,581.00</b>	<b>94,947,259,245.34</b>	<b>9,234,359,911.00</b>	<b>85,337,411,497.30</b>
<b>Surplus/(Defisit) (PENDAPATAN - BELANJA)</b>		<b>44,236,930,383.00</b>	<b>(33,279,729,226.70)</b>	<b>74,062,809,417.00</b>	<b>690,696,735.53</b>	<b>82,423,949,904.00</b>	<b>7,357,703,324.21</b>

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN (AUDITED)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2006**

NO	URAIAN	APBD 2006		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
1	Pendapatan Pajak Daerah	42,678,850,000.00	43,997,150,025.00	103.09
2	Pendapatan Retribusi Daerah	25,028,663,530.00	24,704,781,396.00	98.71
3	Pendapatan Bagian Laba Usaha Daerah	6,885,906,000.00	7,722,505,202.62	112.15
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	20,664,074,470.00	19,995,019,680.90	96.76
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>95,257,494,000.00</b>	<b>96,419,456,304.52</b>	<b>101.22</b>
<b>II</b>	<b>PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN</b>			
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	28,890,203,091.00	40,145,140,985.00	138.96
2	Dana Alokasi Umum	316,832,000,000.00	316,832,000,000.00	100.00
3	Dana Alokasi Khusus	4,800,000,000.00	4,800,000,000.00	100.00
4	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Dari Propinsi	53,342,919,168.00	35,373,712,961.12	66.31
	<b>Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan</b>	<b>403,865,122,259.00</b>	<b>397,150,853,946.12</b>	<b>98.34</b>
<b>III</b>	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH</b>			
1	Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dari Pemerintah	-	-	-
2	Dana Penyesuaian Ad Hoc	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	100.00
3	Hibah	14,202,353,000.00	10,451,927,071.00	93.30
	<b>Jumlah Pendapatan Lain-lain yang sah</b>	<b>26,202,353,000.00</b>	<b>25,451,927,071.00</b>	<b>97.14</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>525,324,969,259.00</b>	<b>519,022,237,321.64</b>	<b>98.80</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>I</b>	<b>BELANJA APARATUR DAERAH</b>			
1	Belanja Administrasi Umum	43,174,324,789.00	36,737,618,808.30	85.09
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan <i>↳ bknge 150 ↳ 17150 + dn 159</i>	20,004,284,464.00	17,833,888,429.00	89.15
3	Belanja Modal / Pembangunan	3,382,189,140.00	3,294,805,480.00	97.42
	<b>Jumlah Belanja Aparatur Daerah</b>	<b>66,560,798,393.00</b>	<b>57,866,312,717.30</b>	<b>86.94</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA PELAYANAN PUBLIK</b>			
1	Belanja Administrasi Umum	289,580,297,710.00	238,144,704,482.00	82.24
2	Belanja Operasi dan Pemeliharaan	63,431,326,526.00	55,504,444,118.00	87.50
3	Belanja Modal / Pembangunan	100,031,802,300.00	76,107,251,594.00	76.08
4	Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan	64,356,241,495.00	59,441,518,162.00	92.32
5	Belanja Tak Tersangka	25,881,685,000.00	9,734,745,979.00	37.61
	<b>Jumlah Belanja Pelayanan Publik</b>	<b>543,281,353,031.00</b>	<b>438,902,664,335.00</b>	<b>80.79</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>609,842,151,424.00</b>	<b>496,768,977,052.30</b>	<b>81.46</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(84,517,182,165.00)</b>	<b>22,253,260,269.34</b>	<b>(26.33)</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>I</b>	<b>PENERIMAAN</b>			
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	76,983,970,898.00	76,983,970,898.00	100.00
2	Transfer dari Dana Cadangan	-	-	-
3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	17,920,000,000.00	-	-
4	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
5	Hibah	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>94,903,970,898.00</b>	<b>76,983,970,898.00</b>	<b>81.12</b>
<b>II</b>	<b>PENGELUARAN</b>			
1	Transfer Ke Dana Cadangan	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	5,093,766,520.00	5,083,766,520.00	99.80
3	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah	2,492,258,116.00	2,245,004,321.52	90.08
4	Pemberian Piutang Daerah	1,375,000,000.00	1,298,000,000.00	94.40
5	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	1,425,764,097.00	90,610,460,325.97	6,355.22
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>10,386,788,733.00</b>	<b>99,237,231,167.49</b>	<b>955.42</b>
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>84,517,182,165.00</b>	<b>(22,253,260,269.49)</b>	<b>(26.33)</b>

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN (AUDITED)**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007**

NO	URAIAN	APBD 2007		
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>			
1	Pajak Daerah	49,274,000,000.00	54,783,202,892.00	111.18
2	Retribusi Daerah	29,092,692,000.00	29,197,466,013.00	100.36
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8,799,505,000.00	8,783,239,359.78	99.82
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16,996,685,000.00	21,334,442,677.53	125.52
	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>104,162,882,000.00</b>	<b>114,098,350,942.31</b>	<b>109.54</b>
<b>II</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>			
1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	50,258,480,671.00	47,329,224,538.00	94.17
2	Dana Alokasi Umum	365,042,000,000.00	365,042,000,000.00	100.00
3	Dana Alokasi Khusus	26,788,000,000.00	26,788,000,000.00	100.00
	<b>Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan</b>	<b>442,088,480,671.00</b>	<b>439,159,224,538.00</b>	<b>99.34</b>
<b>III</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>			
1	Hibah	4,988,769,000.00	6,288,730,100.00	126.06
2	Dana Darurat	-	-	-
3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov dan Pemda Lainnya	36,069,500,300.00	37,579,816,500.00	104.19
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	2,917,756,400.00	-
	Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainnya	7,780,120,000.00	15,604,974,000.00	200.57
	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>48,838,389,300.00</b>	<b>(62,391,277,000.00)</b>	<b>127.75</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>595,089,751,971.00</b>	<b>615,648,852,480.31</b>	<b>103.45</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>683,281,388,075.00</b>	<b>569,120,372,561.96</b>	
<b>I</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>559,068,622,838.00</b>	<b>476,583,025,119.55</b>	<b>85.25</b>
	Belanja Pegawai	392,723,577,238.00	332,205,140,033.00	84.59
	Belanja barang	102,454,936,051.00	85,667,260,473.00	
	Belanja Bunga	707,120,555.00	707,120,553.55	100.00
	Belanja Subsidi	307,192,000.00	306,876,000.00	99.90
	Belanja Hibah	-	-	-
	Belanja Bantuan Sosial	62,875,796,994.00	57,696,628,060.00	91.76
	Belanja Bantuan keuangan	-	-	-
	<b>Belanja Modal</b>	<b>100,665,794,491.00</b>	<b>89,982,396,168.00</b>	<b>89.39</b>
1	Belanja Tanah	4,435,310,000.00	4,092,326,400.00	92.27
2	Belanja Peralatan dan Mesin	12,462,982,825.00	11,067,578,735.00	88.80
3	Belanja Gedung dan Bangunan	59,117,570,922.00	50,951,282,032.00	86.19
	Belanja Jalan, Irigasi, dan jaringan	22,942,170,744.00	22,307,082,701.00	97.23
	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,387,060,000.00	1,252,832,300.00	90.32
	Belanja Aset Lainnya	320,700,000.00	311,294,000.00	97.07
<b>III</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>23,546,970,746.00</b>	<b>2,554,951,274.41</b>	<b>10.85</b>
	Belanja Tidak terduga	23,546,970,746.00	2,554,951,274.41	10.85
<b>IV</b>	<b>Belanja Transfer</b>			
	Bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota	-	-	-
	Bagi Hasil retribusi ke Kabupaten Kota	-	-	-
	Bagi hasil Pendapatan lainnya ke Kab/Kota	-	-	-
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>I</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>			
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	90,610,460,326.00	90,610,460,325.97	100.00
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>90,610,460,326.00</b>	<b>90,610,460,325.97</b>	<b>100.00</b>
<b>II</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>			
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-
3	Pembayaran Utang Pokok	958,824,222.00	958,824,221.52	100.00
4	Pemberian Pinjaman Daerah	1,460,000,000.00	1,412,000,000.00	96.71
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2,418,824,222.00</b>	<b>2,370,824,221.52</b>	<b>98.02</b>
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>88,191,636,104.00</b>	<b>88,239,636,104.45</b>	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SILPA)	88,191,636,104.00	134,768,116,022.80	

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**HUTANG JANGKA PANJANG**  
**PER 31 DESEMBER 2005**

No	Uraian	Jk Waktu		So 1 Jan 05 (Rp)	Pindah Baku (Rp)	Pembebanan (Rp)	So 31 des 2005 (Rp)
1	Pembangunan Fasilitas Kota ADB-1198 P/O/SLA-750/1964	2010 - 2014 Rp. 5.616.700.000,00	Pokok	3.254.869.393,74	351.652.154,56	-	2.893.217.238,58 ✓
			Bunga	1.894.486.029,95	389.052.436,67	-	1.435.432.563,25 ✓
			Jasa Bank	39.227.907,16	8.122.601,45	-	31.205.065,70 ✓
				5.098.583.330,85	738.729.622,68	-	4.359.853.707,96 ✓
2	Pemb & Renov Tahap I Per Balai Harjo RDA - 20 / 1983	1993 - 2008 Rp. 3.000.000.000,00	Pokok	432.950.166,55	97.172.036,66	-	295.778.099,99 ✓
			Bunga Ms Tenggang	167.485.221,15	66.994.104,45	-	100.491.150,69 ✓
			Bunga Bejalar	67.590.725,85	40.518.859,70	-	27.061.866,15 ✓
				727.926.113,55	304.684.021,82	-	423.311.116,83 ✓
3	Pemb & Renov Tahap I Per Balai Harjo RDI - 233 / 1991	1996 - 2011 Rp. 6.000.000.000,00	Pokok	2.200.000.000,00	400.000.000,00	-	1.800.000.000,00 ✓
			B. Ad n Ms Tenggang	711.416.200,00	129.548.400,00	-	582.067.800,00 ✓
			B. Ad n Bejalar	602.190.000,00	191.560.000,00	-	410.500.000,00 ✓
				3.513.566.200,00	720.698.400,00	-	2.792.867.800,00 ✓
			Jumlah	9.340.145.674,49	1.764.311.949,60	-	7.575.833.724,89

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**MUTASI BAGIAN LANCAR HUTANG JANGKA PANJANG**  
**TAHUN 2006**

No	Uraian		So 31 Des 05 ( Rp )	Pelunasan ( Rp )	Pembebanan ( Rp )	So 31 des 2006 ( Rp )
2	<b>Pembangunan Fasilitas Kota</b>	Pokok	361.652.154,86	361.652.154,86	361.652.154,86	361.652.154,86
	<b>ADB-1198-INO/SLA-759/1994</b>	Bunga	369.053.466,67	369.053.465,75	326.885.830,00	326.885.830,92
	<b>Jk waktu 2000 - 2014 Rp 5.616.700.000,00</b>	Jasa Bank	8.022.901,45	8.022.900,81	7.106.213,69	7.106.214,33
			<b>738.728.522,98</b>	<b>738.728.521,42</b>	<b>695.644.198,55</b>	<b>695.644.200,11</b>
3	<b>Pemb.&amp; Renov Tahap I Psr Beringharjo</b>	Pokok	197.172.066,66	197.172.066,66	197.172.066,66	197.172.066,66
	<b>RDA - 20 / 1988</b>	Biaya Adm	66.994.100,46	66.994.100,46	66.994.100,46	66.994.100,46
	<b>Jk waktu 1993 - 2008 Rp 3.000.000.000,00</b>	Bunga Berjalan	40.518.859,70	40.518.859,70	22.526.908,62	22.526.908,62
		Denda Biaya Adm	-	-	-	-
			<b>304.685.026,82</b>	<b>304.685.026,82</b>	<b>286.693.075,74</b>	<b>286.693.075,74</b>
4	<b>Pemb.&amp; Renov Tahap II Psr Beringharjo</b>	Pokok	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
	<b>RDI - 233 / 1991</b>	Bi. Adm Ms Tenggang	129.348.400,00	129.348.400,00	129.348.400,00	129.348.400,00
	<b>Jk waktu 1996 - 2011 Rp 6.000.000.000,00</b>	Bi. Adm Berjalan	191.550.000,00	191.550.000,00	155.050.000,00	155.050.000,00
			<b>720.898.400,00</b>	<b>720.898.400,00</b>	<b>684.398.400,00</b>	<b>684.398.400,00</b>
		<b>Jumlah</b>	<b>1.764.311.949,80</b>	<b>1.764.311.948,24</b>	<b>1.666.735.674,29</b>	<b>1.666.735.675,85</b>

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**BAGIAN LANCAR HUTANG JANGKA PANJANG**  
 Per 31 Desember 2007

No	Nama Pinjaman	Jatuh Tempo	Pokok	Bunga / Adm Masa Tg	Jasa Bank / Adm Berjalan	Jumlah
1	Loan ADB No.1198-INO,PPP No.SLA-759 / DP3 / 1994 tgl 7 Sept 1994	15-Jan-08	180.826.077,43	148.799.769,94	3.234.777,61	332.860.624,98
		15-Jul-08	180.826.077,43	136.669.353,91	2.971.072,91	320.466.504,25
2	Pemb.& Renov Thp I Psr Beringharjo RDA - 20 / 1988	15 Feb 2008	98.586.033,33	33.497.050,23	4.534.957,53	136.618.041,09
3	Pemb.& Renov Thp II Psr Beringharjo RDI - 233 / 1991	1 Maret 2008	200.000.000,00	64.674.200,00	63.700.000,00	328.374.200,00
		1 Sept 2008	200.000.000,00	64.674.200,00	55.200.000,00	319.874.200,00
	<b>Jumlah</b>		<b>860.238.188,19</b>	<b>448.314.574,08</b>	<b>129.640.808,05</b>	<b>1.438.193.570,32</b>
	<b>Jumlah Utang Bunga dan Jasa Bank</b>			<b>448.314.574,08</b>	<b>129.640.808,05</b>	<b>577.955.382,13</b>



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682  
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0375  
1178/34

Membaca Surat : Dari Kaprodi Fak. Ekonomi - USD Yogyakarta  
Nomor : 31/Kaprodi Akt/311/IX/2008 Tanggal : 16/01/2009

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : VALENTINA YESI LUSIANA NO MHS / NIM : 052114148  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi - USD Yogyakarta  
Alamat : Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Firma Sulistiyowati, SE., M.Si. QIA  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : ANALISIS RASIO KEUANGAN APBD (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 03/03/2009 Sampai 03/06/2009  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

VALENTINA YESI LUSIANA

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. BAPPEDA Prop. DIY  
3. Ka. BAPPEDA Kota Yogyakarta  
4. Ka. BPS Kota Yogyakarta  
5. Ka. Dinas Pajak Daerah & Pengelolaan Keuangan Yk  
6. Ybs.

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 03-03-2009



DINAS PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA YOGYAKARTA
TANGGAL TERIMA: 14 MAY 2009
NOMOR/KODE: 070/2257.